

LAPORAN KINERJA (LKj)



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat RahmatNya jualah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2023 ini merupakan dokumen yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang ada. Hasil pengukuran Kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2023 dan diharapkan dapat pula menjadi sumber informasi yang memadai sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di masa mendatang, khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentu belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kepada semua pihak/pengguna Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di tahun yang akan datang.



Akhir kata dengan senantiasa selalu mengharap ridho dari Allah SWT, selanjutnya kami berharap pula Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini, akan menjadi pendorong dan motivasi dalam rangka pelaksanaan percepatan peningkatan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kedepan

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. ZAINAL ABIDIN
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19641013 198603 1 012



IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

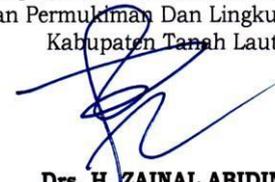
Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023, ada 15 sasaran strategis dan ada 25 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 10 program dan 30 kegiatan.

Pada tahun anggaran 2023 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 101.128.415.426,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 42.813.338.388,- dan Belanja Modal sebesar Rp 58.315.077.038,



Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 91.43%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. ZAINAL ABIDIN
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19641013 198603 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	4
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
F. Isu strategi Perangkat Daerah.....	13
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	15
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	18
I. Sistematika Penyajian	26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	28
A. VISI RPJMD.....	28
B. MISI RPJMD.....	29
C. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	30
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	37
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	47
1. Sasaran RPJMD	53
2. Eselon II.....	56
3. Eselon III.....	106
4. Eselon IV	156
B. Akuntabilitas Keuangan	170
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023	170
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	177
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023.....	186
BAB IV PENUTUP	195
A. Simpulan	195
B. Strategi Peningkatan Kinerja	195



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut diberikan mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan kota dan pengelolaan persampahan serta lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan mandat ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat



pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 serta dalam mencapai Misi Tujuan Organisasi. Dalam menyusun Laporan Kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 antara lain didasarkan atas :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- g) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
- h) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
- j) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Tugas



Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

- k) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini merupakan dokumen yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

- Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD sehingga bisa dijadikan dasar penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun berikutnya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

C. Dasar Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 serta dalam mencapai misi tujuan organisasi. Dalam menyusun LAKIP DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 antara lain didasarkan atas :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

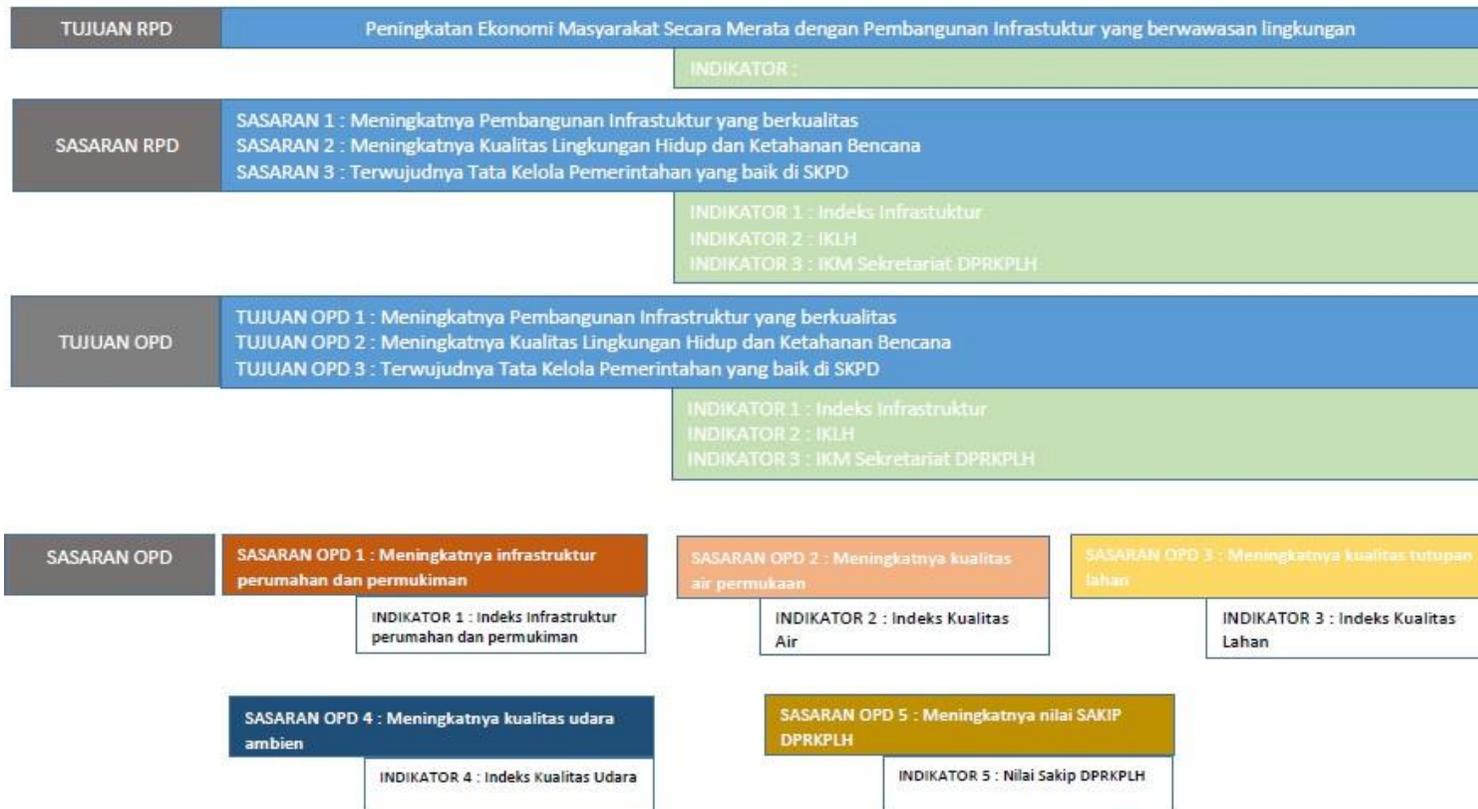


- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - g) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
 - h) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - i) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.



D. Cascading Kinerja

CASCADING KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



BAB I

PROGRAM	PROGRAM 1 : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM 2 : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM 3 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
SASARAN PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan
	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan
	PROGRAM 4 : PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM 5 : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM 6 : PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan - Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan
	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan INDIKATOR 4 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan
	PROGRAM 7 : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM 8 : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PROGRAM 9 : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman
	INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman
	PROGRAM 10 : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM 11 : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM 12 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	Meningkatnya nilai SAKIP DPRKPLH
	INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Nilai Sakip DPRKPLH

BAB I

KEGIATAN	KEGIATAN 1 : Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	KEGIATAN 2 : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota	KEGIATAN 3 : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
SASARAN KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan
	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan
	KEGIATAN 4 : Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	KEGIATAN 5 : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	KEGIATAN 6 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan
	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan
	KEGIATAN 7 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	KEGIATAN 8 : Pengelolaan Sampah	KEGIATAN 9 : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan - Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan
	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan INDIKATOR 4 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan

<p>KEGIATAN 10 : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>Meningkatnya infrastuktur perumahan dan permukiman</p> <p>INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman</p>	<p>KEGIATAN 11 : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>Meningkatnya infrastuktur perumahan dan permukiman</p> <p>INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman</p>	<p>KEGIATAN 12 : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p> <p>Meningkatnya infrastuktur perumahan dan permukiman</p> <p>INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman</p>
<p>KEGIATAN 13 : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Meningkatnya infrastuktur perumahan dan permukiman</p> <p>INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman</p>	<p>KEGIATAN 14 : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</p> <p>Meningkatnya infrastuktur perumahan dan permukiman</p> <p>INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman</p>	<p>KEGIATAN 15 : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p> <p>Meningkatnya infrastuktur perumahan dan permukiman</p> <p>INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman</p>
<p>KEGIATAN 16 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p> <p>Meningkatnya infrastuktur perumahan dan permukiman</p> <p>INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman</p>	<p>KEGIATAN 17 : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</p> <p>Meningkatnya infrastuktur perumahan dan permukiman</p> <p>INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman</p>	<p>KEGIATAN 18 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas air permukaan - Meningkatkan kualitas udara ambien - Meningkatkan kualitas lahan <p>INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan</p>

BAB I

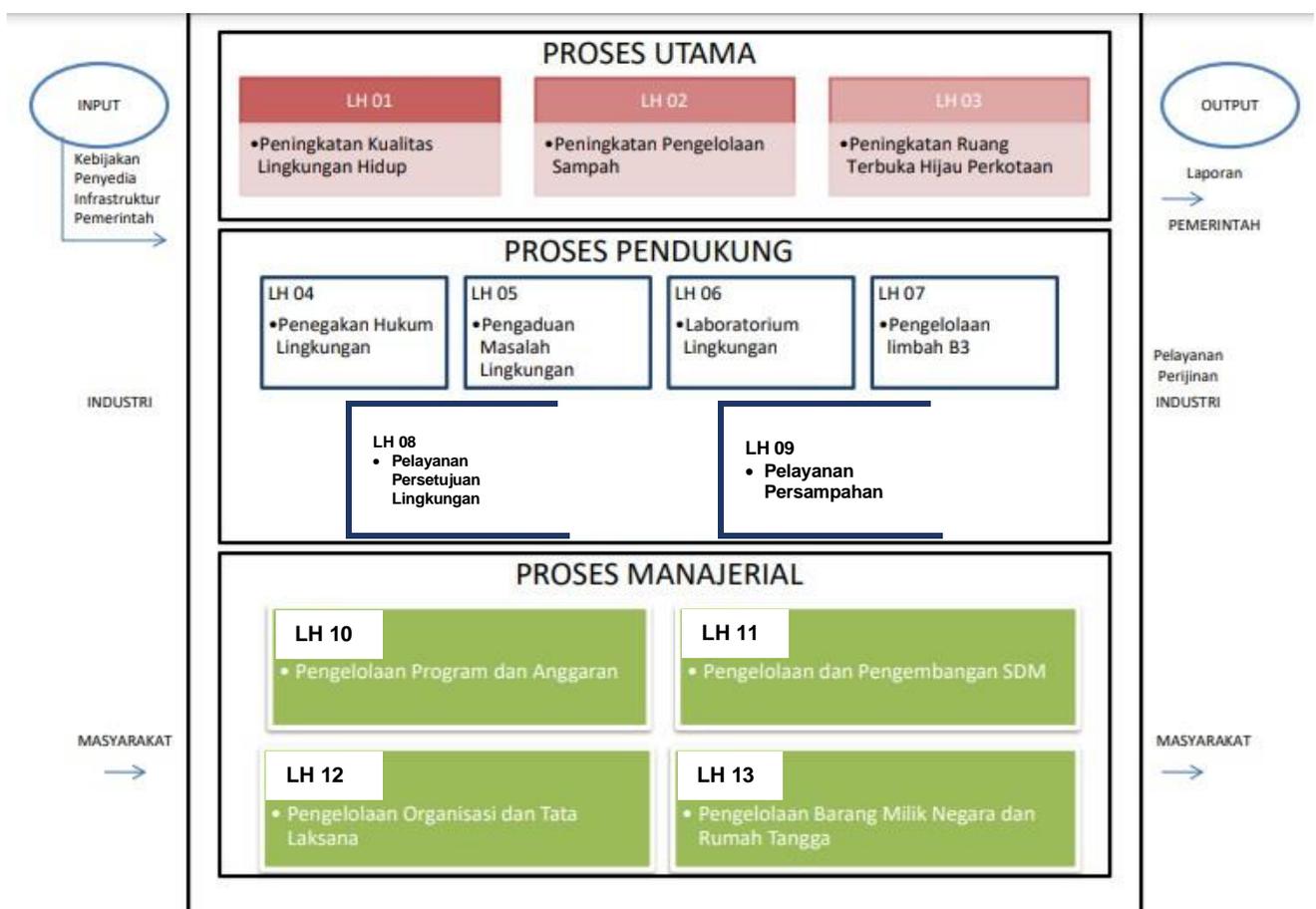
PROGRAM	PROGRAM 1 : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM 2 : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM 3 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
SASARAN PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan
	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan
	PROGRAM 4 : PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM 5 : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM 6 : PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan - Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan
	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan INDIKATOR 4 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan
	PROGRAM 7 : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM 8 : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PROGRAM 9 : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman
	INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman
	PROGRAM 10 : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM 11 : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM 12 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas air permukaan - Meningkatnya kualitas udara ambien - Meningkatnya kualitas lahan 	Meningkatnya nilai SAKIP DPRKPLH
	INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan	INDIKATOR 1 : Nilai Sakip DPRKPLH

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

➤ Proses Bisnis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut memiliki acuan untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan visi misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang digambarkan melalui peta proses bisnis dibawah ini :

Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)
Kabupaten Tanah Laut



Sesuai dengan peta proses bisnis tersebut maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



(DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut dibagi kedalam beberapa unit kerja yang mendukung kinerja baik pada proses utama maupun proses pendukung Dinas.

➤ Tugas Fungsi

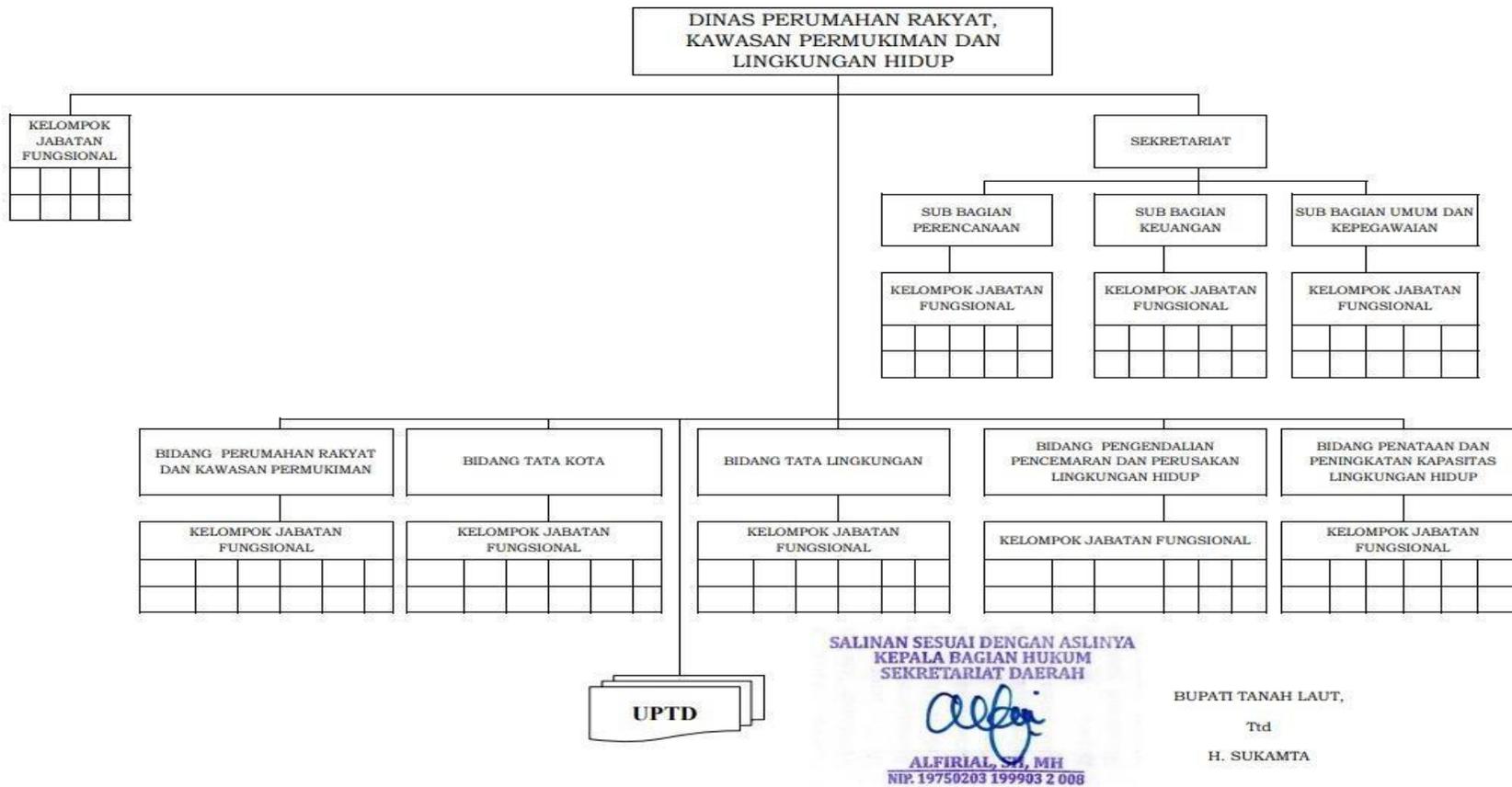
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada SKPD ini.

Didalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 6 (enam) indikator. Dari 6 (enam) indikator tersebut ada 2 (dua) indikator yang ditetapkan pada tahun 2019 telah mencapai target dan ada 3 (tiga) indikator yang belum bisa tercapai yaitu, indeks kualitas air (target 50,25% : realisasi 50%), prosentase RTH yang terbangun (target 36,4% : realisasi 10,93%), prosentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan (target 100% : realisasi 99%). Sementara ada 1 (satu) indikator yang masih dalam proses penilaian yaitu penghargaan kebersihan pada tahun 2023. Dengan kondisi ini, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut telah melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tiap tahunnya dan pada akhir renstra tahun 2023 ini.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 136 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 DESEMBER 2022



F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut pada BAB III Tugas dan Fungsi Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat 1 :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 5 ayat 2 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 4) Pembinaan UPT Dinas dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawal pencapaian RPJMD Kab. Tanah Laut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

Setiap program yang disusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai terwujudnya sasaran strategis organisasi , sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni
3. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan



4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidupMeningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
6. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
7. Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana
8. Meningkatnya Kawasan Perumahan Yang Telah Terpenuhi Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
9. Meningkatnya Penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)
10. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
11. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
12. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
13. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Berkaitan dengan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, tentu tidak bisa lepas dari permasalahan dan issue strategis yang dihadapi sepanjang tahun 2022, antara lain :

- ✓ Belum sebandingnya antara peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pemantauan lingkungan & pengendalian pencemaran;
- ✓ Masih terbatasnya SDM dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan hidup;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan pengaduan dan belum sesuainya penanganan pengaduan terhadap SOP;
- ✓ Masih kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan Pengawasan terhadap kegiatan usaha.
- ✓ Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah.
- ✓ Semakin kompleknya permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan;
- ✓ Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas kebersihan sungai;
- ✓ Masih kurangnya jumlah SDM/ tenaga lapangan untuk posisi teknis PJU lapangan;
- ✓ Masih kurangnya tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga pada kawasan permukiman;
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU;



- ✓ Kurang berdayanya masyarakat untuk memperbaiki rumah dan;
- ✓ Belum optimalnya penanganan prasarana utilitas (PSU) oleh masyarakat / pengembang.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

❖ Dukungan SDM

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut didukung sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia (personil) serta sarana dan prasarana.

Adapun komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2023 terdiri atas 185 orang ASN dan 161 orang PTT, seperti dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.1 Komposisi Personil (ASN + PTT) DPRKPLH Tanah Laut per 31 Des. 2023

No	Personil	Jumlah (org)	%
1.	ASN	185	55
2.	PTT	161	45
	Jumlah	346	100

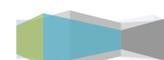
Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2023

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2022 berdasar tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2 Komposisi Personil (ASN) DPRKPLH Tanah Laut berdasar Tingkat Pendidikan per 31 Des. 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	%
1.	SD	5	8
2.	SLTP	4	6
3.	SLTA	17	27
4.	D3	7	11
5.	D4/S1	20	32
6.	S2	9	15
	Total	62	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2023



Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan per 31 Des. 2022 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini

Tabel 1.3 Komposisi Personil (ASN + PTT) Berdasar Golongan per 31 Des. 2023

No	Golongan	Jumlah (org)	%
1.	IV	5	2
2.	III	31	8
3.	II	15	7
4.	I	11	2
5.	PTT	62	81
	Total	124	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2023

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan per 31 Des. 2023 dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini

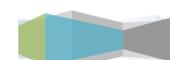
Tabel 1.4 Data ASN Menurut Jabatan Struktural dan Staf Fungsional per 31 Des. 2022

No	Formasi Jabatan	Jumlah (org)	%
1.	Eselon II	1	2
2.	Eselon III	6	10
3.	Eselon IV	7	11
4.	JFT	11	18
5.	Staf	37	60
	Total	62	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2023

❖ Sarana Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut masih



kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius.

❖ **Anggaan**

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara dan difungsikan dengan target 11 jenis telah terealisasi 18 jenis yaitu excavator, dumptruk, loader, truk crane, station wagon, minibus, truk attachmen, pick up, mobil tanki, mobil tinja kendaraan bermotorkhusus, kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, AC, PC Komputer, Laptop, printer, genset dengan capaian lebih dari 100% dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional I atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 218.194.610 dengan realisasi sebesar Rp 210.972.190 atau capaian sebesar 96,69 %, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 59.369.691 dengan realisasi sebesar Rp 58.180.000 atau capaian sebesar 98,00%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 919.065.386 dengan realisasi sebesar Rp 800.130.824 atau capaian sebesar 87,06% , Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu sebesar Rp 114.726.162 dengan realisasi sebesar Rp 113.990.300 atau capaian sebesar 99,36% , Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya



TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Penghargaan kebersihan pada tahun –n	2 penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	100%
	2. Indeks Kualitas Air	58,52	55,38	94,63%
	3. Indeks Kualitas udara ambient	91,95	92,10	100,16%
	4. Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	75%	78%	106,12%
	5. Persentase RTH yang terbangun	4%	2,22%	55,5 %
Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	1. Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)	99,80% (499 Unit)	99,80%



CAPAIAN & EVALUASI KINERJA

Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	4 Pengaduan (100%)	16 Pengaduan (100%)	400%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL - UPL	70% (10 Amdal)	7,14 % ((1/14)x100%)	14,30%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL - UPL	20% (70 UKL- UPL)	2,27 % ((2/88)x100%)	14,20%
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah yang terbentuk dimasyarakat/sekolah	100 % (5 bs)	100% (5 bs)	100%
		Persentase bank sampah yang terkelola di masyarakat/sekolah	100 % (20bs)	100% (21bs)	100%

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 Dokumen
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Terbangun	3 RTH
	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola	32 Taman
	Luas RTH yang dikelola Kewenangan Kabupaten/Kota	11.81144 Ha
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	125 Dokumen
	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Laporan
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/Ditangani	4 Dokumen

TATA LINGKUNGAN

Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase kajian lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100% (5 Dokumen)	100% (5 Dokumen)	200%
	Persentase <u>Peretujuan Lingkungan</u>	100% (1 Dokumen)	100% (1 Dokumen)	100%

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten /Kota yang Disusun	1 Dokumen
<u>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen
<u>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</u>	Jumlah <u>Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelavakan Operasi yang Diberikan</u>	1 Dokumen



TATA KOTA

Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%
Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 Unit	499 Unit	99,80%
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	3.575 Unit	715%

Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	499 KK	99,80%
Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Indikator Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	14 KP	200 %
Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	14 Komplek Perumahan	200 %
Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	500 Unit	273 Unit	54,60%
Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	12 Rekomendasi izin mendirikan rumah	171,42%

UPT KEBERSIHAN

Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	4 Pengaduan (100%)	16 Pengaduan (100%)	400%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL - UPL	70% (10 Amdal)	7,14 % ((1/14)x100%)	14,30%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL - UPL	20% (70 UKL- UPL)	2,27 % ((2/88)x100%)	14,20%
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah yang terbentuk dimasyarakat/sekolah	100 % (5 bs)	100% (5 bs)	100%
		Persentase bank sampah yang terkelola di masyarakat/sekolah	100 % (20bs)	100% (21bs)	100%

Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	7 Unit (2 Armada Roda 3 dan 5 unit Kontainer Sampah)	7 Unit (2 Armada Roda 3 dan 5 unit Kontainer Sampah)	100%
Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	64 buah sarpras (50%)	84 buah sarpras (66,14%)	131.25 %

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit
Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA	17520 Ton
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	27 unit

UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	800 sampel	984 sampel	123%
Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	11 jenis	11 jenis	100%
Melakukan pemeliharaan peralatan LAB	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan	22 jenis	22 jenis	100%
Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	13 orang	13 orang	100%
Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Nilai retribusi jasa uji Lab	Rp.400.000.000	Rp. 412.040.000	103,1%

Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	5 Dokumen

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dokumen
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan (bulan)	12 Bulan
	Jumlah Laporan yang disusun	5 dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Paket

KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **39 Sasaran Strategis 53 Indikator Kinerja Utama** pada tahun 2022 yang sudah diuraikan dalam Laporan Kinerja dapat dilihat 12 (dua belas) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **lebih dari 100%**, 30 (tiga puluh) indikator dengan tingkat capaian kinerja **100%**, 10 (sepuluh) indikator dengan tingkat capaian kinerja **kurang dari 100%**.

Pada tahun 2023, rencana kegiatan akan memprioritaskan upaya meningkatkan Penyelamatan dan Pelestarian Lingkungan, serta memprioritaskan pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dalam penyusunannya Program dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR IKHTISAR

EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Instrument Pendukung Capaian Kinerja

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon II
 3. Eselon III
 4. Eselon IV
- B. Akuntabilitas Keuangan
 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023



2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Bab IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2023
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. MatriksKeselarasan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

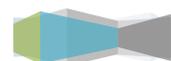
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan amanat itu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Tanah Laut dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Visi yang di emban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 sesuai Perda nomor 2 Tahun 2019 adalah menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut

:

- **BERKARYA** : *Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu : secara bersama- sama berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat;*
- **INOVASI** : *Solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.*
- **TERTATA** : *Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintahan*



yang tertata dan terkelola dengan baik (Good Governance);

- **RELIGIUS** : *Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat;*
- **AKTUAL** : *Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani; dan;*
- **SINERGI** : *Integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi.*

B. MISI RPJMD

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 Misi sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.



Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

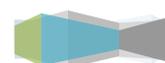
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman
2. Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan
3. Terwujudnya rumah sehat dan layak huni
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien



b. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni
3. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup
5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT
7. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana
9. Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
10. Meningkatnya Penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) 1
11. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
12. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
14. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor. 1
15. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "**BERINTERAKSI**" (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi*)

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
							2019	2021	2021	2022	2023
1	Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Diperoleh penghargaan kebersihan	2 (Adi pura dan Adiwiyata)	Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan	penghargaan kebersihan (skor)	2 (Adipura dan Adiwiyata)				
						Indeks kualitas air	50,25	50,5	58,42	58,52	58,62
						Indeks kualitas udara	87	87,25	91,85	91,95	92,05
						Indeks kualitas tutupan lahan	-	-	41,58	41,68	41,78

					Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	71,06%	72%	73,5 %	75%	80%
					Persentase RTH yang terbangun	0,5%	0,5%	1%	3,5%	5%
		Persentase Terbentuk BS.	(100%) 25 Unit	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	5 BS (100%)				
		Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU)	35 KP (100%)	Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas PSU	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)				
				Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	presentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

						Presentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2		Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	(6 Dokumen)	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	1. Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	2 Dokumen, 1 Laporan	2 Dokumen, 1 Laporan	3 Dokumen, 1 Laporan	100% (4 Dokumen)	100%(5 Dokumen)
						2. Persentase Persetujuan Lingkungan	206	285	138	3 SKKL 15 PKPLH 30 SPPL 15 Perte k	100%(1 Dokumen)

					Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	80%	80%	80%	80%	80%
					Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu 2. Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu 3. Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis 	81,00%	81,25%	81,50%	81,75%	81,00%
							91,50%	91,75%	92,00%	92,25%	-
							100%	100%	100%	100%	-
3		Terwujudnya rumah sehat dan layak huni	Persentase perumahan layak huni	100%	Meningkatnya kualitas perumahan layak Huni	Persentase rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%

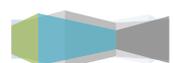
				Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana	100%	%	%	100% (20)	100% (10)
4		Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	71,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
				Nilai RB	60	80	83	86	100	
			Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2023 merupakan gambaran Kinerja tahun 2023. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan target tahunan yaitu tahun kelima RPJMD. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama.

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan Pohon Kinerja dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KEPALA DINAS						
1	Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan	1	penghargaan kebersihan (skor)			
		2	Indeks kualitas air	58,62	53,57	91,38%
		3	Indeks Kualitas udara	92,05	95,84	104,12%
		4	Indeks kualitas tutupan lahan	41,78	44,27	105,96%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	5	Persentase Rumah Layak Huni	500 unit	3.250 unit	650%
		6	Persentase kawasan permukiman kumuh			
IKU SEKRETARIS						
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, Keuangan dan pelaporan	7	Nilai SAKIP SKPD	80	80	100%
4	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	8	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	9	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
IKU PERENCANAAN						
6	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	10	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	6	6	100%
7	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	11	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3	3	100%
IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN						
8	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	12	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 Jenis	11 Jenis	100%



		13	Jumlah dokumen administrasi perkantoran,kepegawaian yang dilaksanakan	3	3	100%
9	Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	14	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2000 Surat	2.246 Surat	112%
10	Merencanakan dan mengadakan penyebaran informasi pembangun daerah	15	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	3 dokumen	3 dokumen	100%
11	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	16	Jumlah aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	100%
12	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	17	Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi	1 kali pameran (teknologi tepat guna)	1 kali pameran dan akun sosial media (memberikan informasi publik)	100%

IKU KEUANGAN

13	Merencanakan, menyusun dan membayar gaji dan TPP PNS dan PPPK		Jumlah Pembayaran Gaji dan TPP yang dibayar	55 orang	55 orang	100 %
14	Menyusun laporan keuangan SKPD		Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	100%

IKU KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

14	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	18	Volume sampah yang terkelola di TPA	36.898,69	17.264,50	47%
		19	Volume sampah yang terkelola 3R	15.813,73	5387,49	34,07%
15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH	20	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen amdal	100	100	100%
16	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	21	Persentase pengelolaan Pengaduan bidang lingkungan hidup	4 Pengaduan	8 Pengaduan	200%

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

17	Meningkatnya kualitas sarpras pengelola sampah	22	Persentase sarpras pengelola sampah dalam kondisi baik	55	20	36%
----	--	----	--	----	----	-----



18	Menurunnya timbunan sampah	23	Jumlah timbunan sampah	52.712,42	22.651,99	43%
19	Meningkatnya luasan TPS 3R	24	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%
20	Meningkatnya peran masyarakat pengelolaan sampah 3R	25	Persentase bank sampah yang aktif	34	20	58,82%

**IKU JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU & JABATAN
FUNGSIONAL UMUM**

21	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	26	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	18	18	100%
		27	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	82	84	102%
22	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	28	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	10	14	140%
23	Melakukan penerapan sanksi administratif	29	Jumlah sanksi administratif	0	0	0%

**IKU SUB KOORDINATOR
PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA**

24	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	30	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	4	8	200%
25	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	31	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	4	8	200%
26	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang LH	32	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	4	8	200%
27	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut Pengaduan	33	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	4	7	175%

**IKU KABID PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

28	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	34	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,00%	77.30 %	95.43%
	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	35	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	-	-	-
	Meningkatnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	36	Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	-	-	-



IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM						
29	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	37	jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 dokumen	1 dokumen	100%
30	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	38	jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%
31	Meningkatnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	39	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM						
32	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara ambient	40	Jumlah sungai yang dibersihkan	-	-	-
33	Melaksanakan pengujian kualitas air	41	Jumlah uji kualitas air	2 kali	2 kali	100%
34	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	42	Jumlah uji kualitas udara ambient	2 kali	2 kali	100%
35	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	43	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 kecamatan	11 kecamatan	100%
IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM						
36	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	44	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	-	-	-
37	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	45	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	-	-	-
38	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	46	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100%
IKU KABID TATA LINGKUNGAN						
39	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	47	Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	100%	100%	100%
		48	Persentase persetujuan	100%	100%	100%



			lingkungan			
IKU SUB KOORDINATOR INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS						
40	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	49	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
41	Melaksanakan Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	50	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
IKU SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP						
42	Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup	51	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
IKU SUB KOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN						
43	Melaksanakan Penyusunan Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	52	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
44	Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana	53	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana	100% (3 Unit)	100% (3 Unit)	100% (3 Unit)
45	Kualitas PSU	54	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana			
IKU SUB KOORDINATOR TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA						
46	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	55	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
47	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	56	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 KK	325 KK	65%



48	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	57	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	3.250 Unit	650%
----	---	----	------------------------------------	----------	------------	------

IKU SUB KOORDINATOR TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

49	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah Rumah	58	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	325 KK	65%
50	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	59	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	5 KP	71,43 %
51	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	60	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	5 KP	71,43 %
52	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	61	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	500 Unit	570 Unit	114%
53	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	62	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	11 Rekomendasi izin mendirikan rumah	157%

IKU KABID TATA KOTA

54	Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	63	Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara	32 Taman dan 3 RTH	32 Taman dan 3 RTH	100%
55	Penarikan retribusi pemakaian fasilitas olah raga yang ada di RTH	64	Nilai retribusi yang berhasil di dapatkan	16.800.000	19.100.000	113%

IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN

56	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	65	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	52.712,42 Ton	37.126,26 Ton	70,5%
57	Melakukan pengolahan sampah di TPA	66	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	17.250 Ton	15.782,13 Ton	91,49%
58	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	67	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
59	Melaksanakan data pengolah sampah di Masyarakat	68	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
60	Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota	69	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
61	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	70	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	78 unit	78 unit	88 unit (100 %)
62	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	71	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	52 buah sarpras (100%)	52 buah sarpras (100%)	100%
63	Menurunnya timbunan sampah	72	Jumlah timbunan sampah	52.712,42	22.651,99	43%
64	Meningkatnya luasan TPS 3R	73	Persentase	11	1	9%



			pertumbuhan luasan TPS 3R			
IKU KEPALA UPT LABORATORIUM M LINGKUNGAN						
65	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	74	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	984	1081	109,85%
66	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	75	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	9	8	89%
67	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB	76	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	24	24	100%
68	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab	77	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12	12	100%
69	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	78	Nilai retribusi jasa uji Lab	500.000.000	525.215.000	105%
IKU KEPALA TU LABORATORIUM M LINGKUNGAN						
70	Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB	79	Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	2	2	100%
71	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	80	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5	5	100%



IKU KABID TATA LINGKUNGAN				
10	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	17	Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di dimanfaatkan	100 %
		18	Persentase Persetujuan Lingkungan	100 %
IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
11	Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana Kualitas PSU	19	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana	100% (3 unit)
12		20	Persentase luas wilayah yang PSU nya standar	
IKU KABID TATA KOTA				
17	Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	21	Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara	100%
18	Penarikan retribusi pemakaian fasilitas olah raga yang ada di RTH	22	Nilai retribusi yang berhasil di dapatkan	113%
IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN				
19	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	23	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	52.712,42Ton (70.5%)
20	Melakukan pengolahan sampah di TPA	24	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	17.250 Ton (91.49 %)
21	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	25	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	11 Kecamatan (100%)
22	Melaksanakan data pengolah sampah di Masyarakat	26	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	11 Kecamatan (100%)
23	Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota	27	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	11 kecamatan (100%)
24	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	28	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	78 Unit (100%)
25	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	29	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	52 buah sarpras (100%)
26	Menurunnya timbunan sampah	30	Jumlah timbunan sampah	22,651.99 (43%)
27	Meningkatnya luasan TPS 3R	31	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	1 (9%)
28	Meningkatnya peran masyarakat pengelolaan sampah 3R	32	Persentase bank sampah yang aktif	58,88%
IKU KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN				
29	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	33	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	109.85%
30	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	34	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	89%
31	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB	35	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	100%
32	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab	36	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	100%
33	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	37	Nilai retribusi jasa uji Lab	105%
IKU KEPALA TU LABORATORIUM LINGKUNGAN				



34	Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB	38	Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	100%
34	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	39	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	100%
IKU PERENCANAAN				
35	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	40	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	100% (6 Dokumen)
36	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	41	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	100% (3 Dokumen)
IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
37	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	42	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	100%
		43	Jumlah dokumen administrasi perkantoran,kepegawaian yang dilaksanakan	100%
38	Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	44	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	112%
39	Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	45	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%
	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	46	Jumlah aset yang tercatat	100%
40	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	47	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informas	100%
IKU KEUANGAN				
41	Merencanakan dan menyusun Pembayaran Gaji PNS, PPPK dan Tunjangannya	48	Jumlah gaji dan tpp yang dibayar tiap bulan	Org/bulan (55/12bln)
42	Menyusun laporan keuangan SKPD	49	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 dokumen

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023, ada 15 sasaran strategis dan ada 26 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup , 25 indikator ini dicapai melalui 12 program, 21 kegiatan dan 48 sub kegiatan.



Pada tahun anggaran 2023 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 101.128.415.426,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 42.813.338.388,- dan Belanja Modal sebesar Rp 58.315.077.038,-

Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 91,43%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

Program dan Kegiatan yang di laksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.4
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran
I	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.200.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.650.000,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.847.500,00
			7.459.203.298,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.733.392.979,00
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.688.000,00
			305.770.005,00	Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	385.383.150,00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.785.550,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	49.969.500,00

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.084.450,00
			6.283.585.469,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.430.930,00
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.576.632,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.986.655.337,00
			249.224.197,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.527.250,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.150.000,00
II	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.050.186.776,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan rumah Tidak Layak Huni	3.977.737.870,00
			10.252.020.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	10.252.020.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	25.928.996.288,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	24.114.011.626,00

		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	99.525.200,00
III	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.556.479.335			1.442.333.409
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	74.950.017	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	65.404.030
			263.560.469	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	231.032.910
			54.999.741	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	51.885.440
IV	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.390.883.172,00	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.265.097.796,00

V	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Tata Lingkungan	162.055.850			155.276.550
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	24.829.850	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	22.855.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	69.936.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	65.505.300
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	67.290.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	66.916.250
VI	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Tata Kota dan Kebersihan	42.135.893.494			40,312,861,250
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30.539.418.575	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	29.037.252.094
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.596.474.919	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.275.609.156

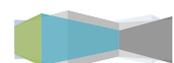
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja ketiga RPJMD 2018- 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023

Pada tahun Tahun 2023 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada APBD Murni yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 8.656.116.291,- dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 36.670.838.388,- Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 91.43%. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023, ada 15 sasaran strategis dan ada 26 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup , 25 indikator ini dicapai melalui 10 program dan 30 kegiatan.

Realisasi Capaian Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KEPALA DINAS						
1	Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan	1	penghargaan kebersihan (skor)			
		2	Indeks kualitas air	58,62	53,57	91,38%
		3	Indeks Kualitas udara	92,05	95,84	104,12%
		4	Indeks kualitas tutupan lahan	41,78	44,27	105,96%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	5	Persentase Rumah Layak Huni	500 unit	3.250 unit	650%
		6	Persentase kawasan pemukiman kumuh			
IKU SEKRETARIS						
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, Keuangan dan pelaporan	7	Nilai SAKIP SKPD	80	80	100%
4	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	8	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	9	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%



IKU PERENCANAAN						
6	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	10	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	6	6	100%
7	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	11	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3	3	100%
IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN						
8	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	12	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 Jenis	11 Jenis	100%
		13	Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian yang dilaksanakan	3	3	100%
9	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	14	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2000 Surat	2.246 Surat	112%
10	Merencanakan dan mengadakan penyebaran informasi pembangunan daerah	15	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	3 dokumen	3 dokumen	100%
11	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	16	Jumlah aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	100%
12	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	17	Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi	1 kali pameran (teknologi tepat guna)	1 kali pameran dan akun sosial media (memberikan informasi publik)	100%
IKU KEUANGAN						
13	Merencanakan, menyusun dan membayar gaji dan TPP PNS dan PPPK		Jumlah Pembayaran Gaji dan TPP yang dibayar	55 orang	55 orang	100 %
14	Menyusun laporan keuangan SKPD		Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
IKU KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS						



14	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	18	Volume sampah yang terkelola di TPA	36.898,69	17.264,50	47%
		19	Volume sampah yang terkelola 3R	15.813,73	5387,49	34,07%
15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH	20	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen amdal	100	100	100%
16	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	21	Persentase pengelolaan Pengaduan bidang lingkungan hidup	4 Pengaduan	8 Pengaduan	200%

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

17	Meningkatnya kualitas sarpras pengelola sampah	22	Persentase sarpras pengelola sampah dalam kondisi baik	55	20	36%
18	Menurunnya timbunan sampah	23	Jumlah timbunan sampah	52.712,42	22.651,99	43%
19	Meningkatnya luasan TPS 3R	24	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%
20	Meningkatnya peran masyarakat pengelolaan sampah 3R	25	Persentase bank sampah yang aktif	34	20	58,82%

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

21	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	26	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	18	18	100%
		27	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	82	84	102%
22	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	28	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	10	14	140%
23	Melakukan penerapan sanksi administratif	29	Jumlah sanksi administratif	0	0	0%

IKU SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

24	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	30	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	4	8	200%
25	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	31	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	4	8	200%
26	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang LH	32	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	4	8	200%
27	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut Pengaduan	33	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	4	7	175%

IKU KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

28	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	34	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,00%	77.30 %	95.43%
----	--	----	--	--------	---------	--------



	hidup					
	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	35	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	-	-	-
	Meningkatnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	36	Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	-	-	-

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

29	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	37	jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 dokumen	1 dokumen	100%
30	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	38	jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%
31	Meningkatnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	39	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

32	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara ambient	40	Jumlah sungai yang dibersihkan	-	-	-
33	Melaksanakan pengujian kualitas air	41	Jumlah uji kualitas air	2 kali	2 kali	100%
34	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	42	Jumlah uji kualitas udara ambient	2 kali	2 kali	100%
35	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	43	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 kecamatan	11 kecamatan	100%

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

36	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	44	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	-	-	-
----	--	----	--	---	---	---



37	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	45	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	-	-	-
38	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	46	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100%

IKU KABID TATA LINGKUNGAN

39	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	47	Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	100%	100%	100%
		48	Persentase persetujuan lingkungan	100%	100%	100%

IKU SUB KOORDINATOR INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS

40	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	49	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
41	Melaksanakan Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	50	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

IKU SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

42	Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup	51	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
----	--	----	--	-----------	-----------	------

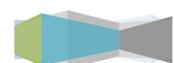
IKU SUB KOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

43	Melaksanakan Penyusunan Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	52	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
----	--	----	---	-----------	-----------	------

IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

44	Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana	53	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana	100% (3 Unit)	100% (3 Unit)	100% (3 Unit)
45	Kualitas PSU	54	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana			

IKU SUB KOORDINATOR TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA



46	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	55	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
47	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	56	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 KK	325 KK	65%
48	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	57	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	3.250 Unit	650%

IKU SUB KOORDINATOR TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

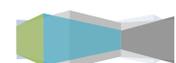
49	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah Rumah	58	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	325 KK	65%
50	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	59	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	5 KP	71,43 %
51	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	60	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	5 KP	71,43 %
52	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	61	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	500 Unit	570 Unit	114%
53	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	62	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	11 Rekomendasi izin mendirikan rumah	157%

IKU KABID TATA KOTA

54	Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	63	Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara	32 Taman dan 3 RTH	32 Taman dan 3 RTH	100%
55	Penarikan retribusi pemakaian fasilitas olah raga yang ada di RTH	64	Nilai retribusi yang berhasil di dapatkan	16.800.000	19.100.000	113%

IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN

56	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	65	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	52.712,42 Ton	37.126,26 Ton	70,5%
57	Melakukan pengolahan sampah di TPA	66	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	17.250 Ton	15.782,13 Ton	91,49%
58	Melakukan sosialisasi pengurangan	67	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%



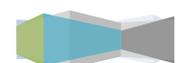
	penggunaan kantong plastik					
59	Melaksanakan data pengolah sampah di Masyarakat	68	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
60	Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota	69	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
61	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	70	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	78 unit	78 unit	88 unit (100 %)
62	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	71	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	52 buah sarpras (100%)	52 buah sarpras (100%)	100%
63	Menurunnya timbunan sampah	72	Jumlah timbunan sampah	52.712,42	22.651,99	43%
64	Meningkatnya luasan TPS 3R	73	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%

IKU KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

65	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	74	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	984	1081	109,85%
66	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	75	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	9	8	89%
67	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB	76	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	24	24	100%
68	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab	77	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12	12	100%
69	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	78	Nilai retribusi jasa uji Lab	500.000.000	525.215.000	105%

IKU KEPALA TU LABORATORIUM LINGKUNGAN

70	Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB	79	Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	2	2	100%
71	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	80	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5	5	100%



IKU PERENCANAAN

6	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	10	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	6	6	100%
7	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	11	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3	3	100%

IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN

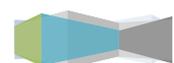
8	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	12	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 Jenis	11 Jenis	100%
		13	Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian yang dilaksanakan	3	3	100%
9	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	14	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2000 Surat	2.246 Surat	112%
10	Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	15	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	3 dokumen	3 dokumen	100%
11	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	16	Jumlah aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	100%
12	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	17	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi	1 kali pameran (teknologi tepat guna)	1 kali pameran dan akun sosial media (memberikan informasi publik)	100%

IKU KEUANGAN

13	Merencanakan dan menyusun Pembayaran Gaji PNS, PPPK dan Tunjangannya	18	Jumlah pembayaran gaji dan tpp yang dibayar tiap bulan	55 orang	7.171.899.551	100 %
14	Menyusun laporan keuangan SKPD	19	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 dokumen	21.612.793	100 %

IKU KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

15	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	20	Volume sampah yang terkelola di TPA	36,898.69	17,264.50	47%
----	--	----	-------------------------------------	-----------	-----------	-----



		21	Volume sampah yang terkelola 3R	15,813.73	5387.49	34.07
16	Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH	22	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen amdal	100	100	100%
17	Meningkatnya pengelolaan pengaduan LH	23	Persentase pengelolaan Pengaduan bidang lingkungan hidup	4	4	100%

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

18	Meningkatnya kualitas sarpras pengelola sampah	24	Persentase sarpras pengelola sampah dalam kondisi baik	55	20	36%
19	Menurunnya timbunan sampah	25	Jumlah timbunan sampah	52,712.42	22,651.99	43%
20	Meningkatnya luasan TPS 3R	26	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%
21	Meningkatnya peran masyarakat pengelolaan sampah 3R	27	Persentase bank sampah yang aktif	34	20	58,88%

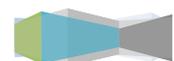
22	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	28	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	100	100	100%
		29	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	75	75	100
23	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	30	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	10	1	10%
24	Melakukan penerapan sanksi administratif	31	Jumlah sanksi administrative	5	3	60%

IKU SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

25	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	32	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	4	4	100%
26	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	33	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	4	4	100%
27	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang LH	34	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	4	4	100%
28	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut Pengaduan	35	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	4	4	100%

IKU KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

29	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH	36	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,00%	77,30%	95,43%
		37	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	-	-	-
		38	Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	-	-	-



IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

30	Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	39	Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	-	-	-
31	Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	40	Jumlah kecamatan/skpd yang tersosialisasi	26 skpd & 11 kecamatan	26 skpd & 11 kecamatan	100%
32	Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	41	Jumlah sampel yang di uji	-	-	-

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

33	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara ambient	42	Jumlah sungai yang dibersihkan	-	-	-
34	Melaksanakan pengujian kualitas air	43	Jumlah uji kualitas air	2 kali	2 kali	100%
35	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	44	Jumlah uji kualitas udara ambient	2 kali	2 kali	100%
36	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	45	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 kecamatan	11 kecamatan	100%
		46	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanaka terhadap media tanah,air,udara dan laut	1 dokumen	1 dokumen	100%

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

37	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	47	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	-	-	-
38	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	48	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	-	-	-
39	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	49	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100%

IKU KABID TATA LINGKUNGAN

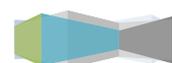
40	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	50	Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	100%	100%	100%
		51	Persentase Perrsetujuan Lingkungan	100%	100%	100%

IKU SUB KOORDINATOR INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS

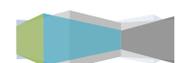
41	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	52	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
42	Melaksanakan Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	53	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

IKU SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

43	Melaksanakan	54	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan			
----	--------------	----	-------------------------------------	--	--	--



	Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup		sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
IKU SUB KOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN						
44	Melaksanakan Penyusunan Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	55	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
45	Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana	56	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana	100% (3 Unit)	100% (3 Unit)	100% (3 Unit)
46	Kualitas PSU	57	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana			
47	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	58	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
48	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	59	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 KK	325 KK	65%
49	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	60	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	3.250 Unit	650%
IKU SUB KOORDINATOR TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA						
50	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah Rumah	61	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	325 KK	65%
51	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	62	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	5 KP	71,43 %
52	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	63	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	5 KP	71,43 %
53	Melakukan verifikasi dan validasi rumah	64	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	500 Unit	570 Unit	114%



	yang akan di laksanakan					
54	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	65	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	11 Rekomendasi izin mendirikan rumah	157%

IKU KABID TATA KOTA

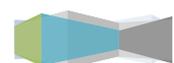
55	Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	66	Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara	32 Taman dan 3 RTH	32 Taman dan 3 RTH	100%
56	Penarikan retribusi pemakaian fasilitas olah raga yang ada di RTH	67	Nilai retribusi yang berhasil di dapatkan	16.800.000	19.100.000	113%

IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN

57	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	68	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	52.712,42 Ton	37.126,26 Ton	70.5%
58	Melakukan pengolahan sampah di TPA	69	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	17.250 Ton	15.782,13 Ton	91.49 %
59	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	70	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	11 Kecamatan	11 kecamatan	100%
60	Melaksanakan data pengolahan sampah di Masyarakat	71	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	11 Kecamatan	11 kecamatan	100%
61	Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota	72	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	11 Kecamatan	11 kecamatan	100%
62	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	73	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	78 unit	78 unit	88 unit (100 %)
63	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	74	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	52 buah sarpras (100%)	52 buah sarpras (100%)	100%
64	Menurunnya timbunan sampah	75	Jumlah timbunan sampah	52,712.42	22,651.99	43%
65	Meningkatnya luasan TPS 3R	76	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%
66	Meningkatnya peran masyarakat pengelolaan sampah 3R	77	Persentase bank sampah yang aktif	34	20	58.82%

IKU KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

67	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	78	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	984	1081	109.85%
68	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	79	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	9	8	89%
69	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB	80	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	24	24	100%
70	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab	81	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12	12	100%
71	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	82	Nilai retribusi jasa uji Lab	500,000,000	525,215,000	105%



IKU KEPALA TU LABORATORIUM LINGKUNGAN

72	Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB	83	Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	2	2	100%
73	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	84	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5	5	100%

1. Sasaran RPJMD

DPRKPLH sebagai SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini DPRKPLH mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

Tabel Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Tahun 2023		
			2022	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (skor)	92,10	92,05	95,84	104,12%
		Indeks Kualitas Air (skor)	55,38	58,62	53,57	91,38%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (skor)	41,68	41,78	44,27	105,96%
		Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	140 %	18	18	100 %



2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Pengelolaan Persampahan	11 Kecamatan	100%	11 Kecamatan	91.49%,
3	Program Tata Kota dan Kebersihan	Luasan RTH publik kota (Ha)	169,6 Ha	110,5	169,658 Ha	153,48%
4	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	36,24	1	36,24	1.208%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	96,57	75	97	129%
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,21	1	0,21	7%
		Cakupan pembangunan rumah pasca bencana (%)	0%	100%	100% (3 Unit)	100%

1.1 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup).

1.1.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator Indeks Kualitas Air (skor)

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks kualitas air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Pada tahun 2023 melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan



pengujian sampel kualitas air. Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2022 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai menurut Perda RPPLH tahun 2021 - 2051 adalah 60,77 sedangkan hasil yang dicapai 53,58. Sedangkan berdasarkan Renstra tahun 2018 - 2023 target IKA yang akan dicapai adalah 58,62 untuk tahun 2023. Perubahan target IKA pada Perda RPPLH dikarenakan terdapat perubahan rumus perhitungan nilai IKA dimana sebelumnya memakai 7 parameter sedangkan peraturan yang baru memakai 8 parameter sehingga target nilai IKA diperbaiki di Perda RPPLH yaitu 60,77. Indeks kualitas Air belum berhasil memenuhi target tahun 2023.

Tabel Indeks Kualitas Air

No	Tahun	Target	Hasil
1	2022	58,52	55,38
2	2023	58,62	53,57

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, beserta seluruh staf dibawahnya.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air yang belum memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga dan mengelola kualitas air melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas air sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas air pada musim kemarau dan musim



penghujan.

Pemantauan kualitas air sungai untuk data Indeks Kualitas Air (IKA) yang dilakukan di 6 (enam) sungai yaitu sungai Kintap, Sungai Asam-Asam, Sungai Tabanio, Sungai Maluka, sungai Sabuhur, dan sungai Swarangan. Pemantauan dilakukan 2 kali dan dilakukan di hulu dan hilir masing-masing sungai.

Dari 17 (Tujuh belas) parameter air sungai yang diuji, 8 (delapan) parameter yang digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah : pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli.

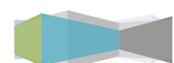
Dari hasil Analisa kualitas parameter air pada sungai dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah total coliform, TSS, BOD Fecal Coliform, TDS, COD.

Dari hasil analisis penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Pencemar pada 28 titik pantau sungai diketahui terdapat 8 dengan status memenuhi dan 17 titik pantau dengan status cemar ringan, dan 3 titik pantau dengan status cemar sedang

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air** adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah kegiatan/ usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan khususnya pencemaran air
2. Kesadaran masyarakat dan penanggungjawab kegiatan/usaha masih rendah.
3. Kurangnya ketaatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
4. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup

Adapun upaya tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi



permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Memperketat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah..
3. Dukungan pemerintah daerah pada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan serta dapat memenuhi jumlah parameter wajib yang dipersyaratkan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air.

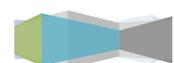
Untuk mendukung pencapaian nilai Indeks Kualitas Air, telah dilaksanakan pengadaan 1 paket alat pemantau kualitas air Online dan Otomatis (ONLIMO) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Alat tersebut dibangun di Intake PDAM di Kecamatan Bajuin. Pemasangan alat ONLIMO di Intake PDAM juga dapat membantu untuk mengetahui kualitas air baku PDAM.

Rencana aksi yang dilakukan:

1. Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air
2. Membuat edaran tentang mengelola sampah dan limbah
3. Membuat edaran tentang menjaga kebersihan dilingkungan kantor, perumahan, sekolah, pasar.

1.1.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 2 Indeks Kualitas Udara(skor)

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 1 Indeks Kualitas Udara (skor) sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH



Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan dan Kasi Pemantauan Lingkungan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

Angka Indeks Kualitas Udara diperoleh dari perhitungan indeks kualitas udara yang mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (*sumber: IKLH Indonesia, 2014*).

$$\text{Persamaan Indeks Udara IKLH} = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Keterangan Rumus :

I_{eu} = rata rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantaun dibagi NO₂ Ref EU)

Indeks kualitas Udara merupakan hasil dari pemantauan kualitas udara dengan parameter SO₂ dan NO₂. Kriteria 4 lokasi pengambilan sampel udara ambien yaitu :

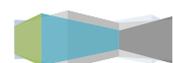
a. Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

b. Industri

Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara disekitar kegiatan industri. Jarak pemantauan tidak terlalu dekat dengan sumber emisi minimal 15 meter dari sumber.

c. Pemukiman



Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan disekitar pemukiman padat.

d. Perkantoran/pasar/komersial

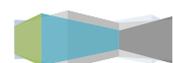
Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada disekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan September. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili, pemasangan alat dilakukan pada hari yang sama di 4 titik pantau, kemudian akan diambil kembali setelah dipaparkan selama 14 hari.

Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara Ambien yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan pencapaian indeks 95,84 pada tahun 2023 telah melebihi target tahun 2023 senilai 92,05 dan melebihi target Renstra 2018-2023 dimana sampai dengan tahun 2023 indeks kualitas udara ditargetkan sebesar 87,75 dan telah melebihi target RPJMD sebesar 87,50, serta melebihi target IKU tahun 2022 sesuai Perda RPPLH yaitu 91,95.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara Ambien yang memenuhi baku mutu antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambien melalui edaran Bupati melalui edaran Bupati yang



disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.

- b. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas udara ambien pada musim kemarau dan musim penghujan.
- c. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil uji laboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili yaitu :

- ✓ Perkantoran (Kantor Bupati Tanah Laut)
- ✓ Padat Transportasi (Jl. A. Yani KM 123 Simpang Empat Asam-Asam)
- ✓ Industri (Depan PT. Indofood Tbk)
- ✓ Pemukiman (Depan Mesjid Al Ikhlas Komplek Kijang Mas Permai)

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks Kualitas Udara** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil.
2. Untuk pengujian kualitas udara ambien pada tahun 2021 masih



belum bisa dilaksanakan di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut, sehingga perlu waktu untuk menunggu antrian pengujian di laboratorium yang lain.

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara, misalnya masih terdapat pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas udara di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Pengendalian emisi dari sumbernya (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak).
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara ambien.

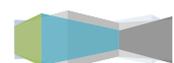
Rencana aksi :

Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas udara ambien.

1.1.3 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 3 Indeks Kualitas tutupan lahan

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (skor) sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

Kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinilai



menggunakan pendekatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur indikator yang digunakan untuk menilai adalah kualitas tutupan lahan. Kualitas tutupan lahan yang dinilai adalah luasan area bervegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah kabupaten yang diukur dalam satuan hektar berdasarkan kenampakannya pada citra satelit. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang indeks 90-100. Jenis penutup lahan yang digunakan untuk mendukung IKTL disajikan sebagai berikut.



Gambar 41. Penutupan Lahan yang Digunakan untuk Menghitung IKTL

Tabel Indeks Tutupan Lahan

No	Tahun	Target	Hasil
1	2022	41,68	44,08
2	2023	41,78	44,27

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan.



b. Melakukan penanaman pohon.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks Kualitas tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

1. Sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau mengakibatkan hilangnya tutupan lahan di kabupaten tanah laut.
2. Lamanya durasi musim kemarau tahun tahun 2023 di Kab. Tanah Laut menyebabkan terjadinya penundaan penanaman pohon untuk menghindari bibit pohon yang mati setelah ditanam karena kekurangan air.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

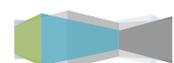
1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara illegal.
3. Memperbanyak kegiatan penanaman pohon.

Rencana aksi :

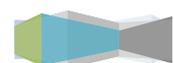
Membuat edaran tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan

1.1.4. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 4 persentase Cakupan pengawasan terhadap AMDAL

Pengawasan lingkungan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kegiatan usaha dan/ atau kegiatan mentaati ketentuan lingkungan yang mengiringi kewajiban pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan adalah terjadinya perubahan lingkungan yang menyangkut perubahan Geografi, Fisik, Kimia, Biologi, Sosial, ekonomi dan Budaya. Dampak Akibat dari suatu kegiatan yang



berlangsung mempengaruhi perubahan ruang atau penggunaan lahan sehingga terjadi perubahan fungsi lingkungan berkenaan dengan pemanfaatan ruang. Demikian juga kegiatan usaha pada suatu tempat berpengaruh terhadap perubahan struktur bentang tanah, Biologi berupa flora dan fauna dan perubahan Sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Fungsi pengawasan bertujuan bagaimana Kegiatan usaha yang diberikan izin usaha oleh Pemerintah Daerah diawasi untuk selalu taat terhadap ketentuan lingkungan. Di dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha berpedoman kepada Dokumen Lingkungan dan izin lingkungan / persetujuan lingkungan yang memuat pedoman pengelolaan lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan. Pada tahun 2023 terdapat 115 perusahaan yang aktif dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 15 Amdal dan 100 UKL-UPL yang izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan / persetujuan lingkungan adalah disetujuinya Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup kegiatan usaha. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Pengelolaan lingkungan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk taat memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan pedoman dokumen lingkungan yang mendasari perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Pada saat pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan bertujuan agar pelaku usaha taat



terhadap ketentuan lingkungan. Adapun permasalahan lingkungan yang ditemukan dalam pengawasan pada umumnya masih ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak optimal. Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

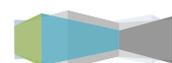
1. Kesesuaian dokumen dengan kondisi senyatanya di lokasi kegiatan, seperti : luasan, kapasitas produksi, peralatan, proses produksi, dll.
2. Kewajiban Pelaporan sebagai sarana pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif).
3. Pengendalian Pencemaran Air (air limbah produksi dan air limbah domestik) : persetujuan teknis pembuangan air limbah dan SLO, fasilitas pengelolaannya (IPAL), dll.
4. Pengendalian Pencemaran Udara : persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, fasilitas pengelolaannya (alat pengendali emisi)
5. Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) : rincian teknis pengelolaan limbah B3, fasilitas pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3), Fasilitas penyimpanan B3 (Gudang B3), dll.

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2023 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan pengendalian pencemaran

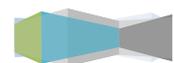
air khususnya untuk air limbah domestik dan pengendalian pencemaran udara terkait persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, serta pelaporan. Pada tahun

2023 sasaran strategis Kabid P2KLH meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan kewenangan Kabupaten Tanah Laut dengan indikator :

1. Perusahaan skala Amdal yang diawasi : 18 Amdal
 - target : 18 Perusahaan
 - realisasi : 18 Perusahaan
 - yang taat : 5 Perusahaan
 - yang tidak taat : 13 Perusahaan
 - Perusahaan skala UKL-UPL yang diawasi : 83 UKL-UPL
 - target : 82 Perusahaan



- realisasi : 83 Perusahaan
 - yang taat : 5 Perusahaan
 - yang tidak taat : 78 Perusahaan
2. Perusahaan skala SPPL yang diawasi : 1 Perusahaan (tidak taat)
 3. Prosentase capaian pengawasan :
 - Perusahaan skala Amdal : $(18/18) \times 100 \% = 100 \%$
 - Perusahaan skala UKL-UPL : $(83/82) \times 100 \% = 101,2 \%$
 4. Prosentase capaian ketaatan Perusahaan :
 - Perusahaan skala Amdal : $(5/18) \times 100 \% = 27,78 \%$
 - Perusahaan skala UKL-UPL : $(5/83) \times 100 \% = 6,02 \%$



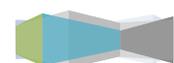
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			
Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (Amdal atau UKL-UPL)	capaian (Amdal atau UKL-UPL)	%	target (Amdal atau UKL-UPL)	capaian (Amdal atau UKL-UPL)	%	target (Amdal atau UKL-UPL)	capaian (Amdal atau UKL-UPL)	%
		20	21	105	15	15	100	15	13	87	20	21	105	25	25	100	10	14	140	18	18
Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	20	13	62	15	10	67	15	12	92	20	15	71	70	24	34	10	(1/14)x100%	7,14	18	5	27,78

Pada tabel diatas di tahun 2023, dilakukan pengawasan terhadap 18 pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal , diantara 18 pelaku usaha tersebut sebanyak 1 pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal atau sebesar 27,78 % dari pelaku usaha memiliki dokumen amdal yang dilakukan pengawasan. prosentase capaian ketaatan Perusahaan pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 namun masih belum mencapai target.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dan Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL antara lain :

1. Adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang mewajibkan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (air limbah produksi maupun air limbah domestik) dan Surat Kelayakan Operasional untuk air limbah yang dihasilkan, dan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi dan Surat Kelayakan Operasional untuk emisi yang dihasilkan.
2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh : Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.

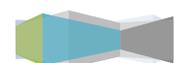


Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait regulasi baru tersebut dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Melakukan pembinaan dan mendorong agar perusahaan mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan mengikuti proper perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

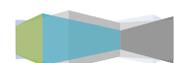
1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala prioritas), mengintensifkan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan skala amdal yang belum taat.
2. Perlunya tindakan tegas maupun kerjasama yang lebih kuat dari para pihak pemerintah (dalam hal ini tidak hanya instansi yang terkait saja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), namun seluruh elemen pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan tegas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan penataan lingkungan hidup.
3. Diperlukan juga tindakan penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
4. Serta perlu adanya kejelasan terhadap keberlanjutan permasalahan sanksi administrasi
5. Perlu dilaksanakan sosialisasi lanjutan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan materi yang mengarah ke penerapan sanksi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.



1.2 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 2 (Program Pengelolaan Persampahan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Limbah dan Sampah

Sasaran RPJMD nomor 2 (Program Pengelolaan Persampahan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Limbah dan Sampah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% namun hanya tercapai sebesar 70.5% untuk mendukung terlaksananya sasaran RPJMD nomor 2 (Program Pengelolaan Persampahan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga dengan indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola dengan target 52.712,42Ton terealisasi 37.126,26 Ton dengan capaian kinerja 70.5%, target pada kinerja ini tidak terealisasi 100% dikarenakan pengelolaan sampah hanya dilakukan di kabupaten kota, ibu kota kecamatan dan sekitarnya.
2. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah di TPA dengan Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA dengan target 17.250 Ton terealisasi 15.782,13 Ton dengan capaian kinerja 91.49%,
3. Kinerja Utama Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan indikator Jumlah sosialisasi pada 11 Kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%
4. Kinerja Utama Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat dengan indikator Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah target Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah terealisasi Jumlah data masyarakat yang



melakukan pengolahan sampah pada 11 Kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%

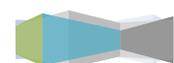
5. Kinerja Utama Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota dengan indikator Jumlah kawasan kota yang dibersihkan dengan target 11 kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%,
6. Kinerja Utama Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar dengan target 78 Unit(2 Armada Roda 2, 8 Unit Kontainer Sampah, 40 Buah Tempat Sampah 3 Warna, 25 Tempat Sampah Besar, 2 Buah Bangunan Pembakar Sampah Domestik, 1 Buah Halte)dengan capaian kinerja 100%

Kinerja Utama Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan target 52 buah sarpras terealisasi 52 buah sarpras dengan capaian kinerja 100%

1.3 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 3 (Program Tata Kota)

1.3.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program TataKota) dengan Indikator 1 Luasan RTH publik kota (Ha)

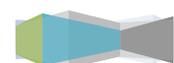
Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid. Tata Kota dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut : Target RTH yang terbangun sampai dengan 2023 pada Renstra 2018-2023 sebesar 2,3% sehingga pencapaian tahun 2021 sebesar 2,22% (2,22% dari luasan kota 7639,66 Ha sebesar 169,6 Ha) masih belum memenuhi target jangka menengah berdasarkan Renstra namun jika di bandingkan dengan target luasan RTH



publik kota pada RPJMD tahun 2023 sebesar 113,75 Ha maka pencapaian kinerja tahun 2021 telah melampaui target RPJMD di tahun 2023. Seiring tumbuhnya perkembangan kota, semakin meningkat pula kebutuhan akan ruang-ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul, berolahraga, berekreasi, dan bersosialisasi. Untuk itu perlu dibuat wadah guna memfasilitasi kegiatan tersebut berupa ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka biasa. Sesuai UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Di Kabupaten Tanah Laut, taman menjadi sebuah ikon yang sangat penting dalam perkembangan kota, sebagai daya tarik dan cerminan dari sebuah wilayah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Tata Kota dan Kebersihan pada Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategi dengan Indikator Kinerja Utama 5 Persentase RTH yang Terbangun antara lain :

1. Masih kurangnya lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk mencapai 30% luas Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dipertanian sulit untuk bisa tercapai.
2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun
3. Masih belum optimalnya sosialisasi, kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar sehingga banyak trotoar yang alih fungsi dari fungsi yang sebenarnya.
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kebersihan lingkungan maupun perkotaan mengakibatkan masih ditemukannya tumpukan sampah dan membuang sampah bukan pada tempatnya.



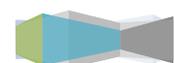
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan masih belum optimalnya jaringan saluran drainase kota yang ada, mengakibatkan banyak terjadi genangan air ketika hujan.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau
2. Optimalisasi pemberdayaan petugas taman yang ada dilapangan untuk menegur atau mengingatkan apabila ditemukan masyarakat yang merusak fasilitas tersebut
3. Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan.
4. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.
5. Pemeliharaan dan pembersihan jaringan drainase dan median jalan perkotaan

Rencana Aksi :

1. Perencanaan yang lebih baik terkait saluran drainase perkotaan dan lingkungan
2. Membuat papan informasi tentang tata tertib aturan untuk menjaga dan melestarikan fasilitas umum RTH yang tersebar
3. Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH
4. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



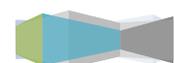
5. Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan.

1.4 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

1.4.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 1 persentase Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Pada tahun 2023 indikator RPJMD persentase Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh ditargetkan 1% dan realisasi penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Laut sebesar 36,24% , peningkatan penataan lingkungan permukiman kumuh ini merupakan sinergitas yang antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



1.4.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis meningkatnya kualitas perumahan layak huni dengan indikator Persentase rumah layak huni pada tahun 2023 terealisasi sebesar 65% (325 Unit), sampai dengan 2023 telah terealisasi sebanyak 2.305 unit rumah layak huni terbangun, sedangkan target Renstra sampai dengan 2023 terbangun 2.500 unit rumah layak huni sehingga pencapaian tahun 2023 masih belum mencapai target jangka menengah.

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah

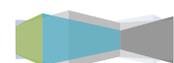
setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal dan mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak

negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, pembangunan sarana dasar yang terbatas dan rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga dampak yang diharapkan dengan dilaksanakannya peningkatan maupun pembangunan perumahan dan permukiman dapat memberikan rumah yang layak sekaligus sebagai salah satu upaya membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan,



kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

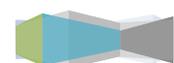
Tahun 2023 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program bedah rumah bagi warga yang berpenghasilan menengah ke bawah dengan memberikan bantuan bahan bangunan dan biaya untuk mendirikan bangunan. Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan target Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 ini dilaksanakan sebanyak 325 unit penerima bantuan dengan sumber dana, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan, APBN.

Kegiatan peningkatan rumah sederhana ini adalah jenis bansos uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ini mengacu pada BNBA (By Name By Address)

Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator persentase rumah layak huni tidak mencapai target 100% terealisasi 65% (325 Unit) dari yang ditargetkan sebanyak 500 unit, hal ini salah satunya dikarenakan sedikitnya usulan-usulan yang di setujui Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis RPJMD dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni** antara lain :

1. Masih terdapat kendala pemenuhan syarat administrasi penerima bantuan
2. Kualitas rehabilitasi rumah yang kurang optimal
3. Ketepatan penyelesaian pekerjaan yang masih rendah
4. Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan



kepada Pemerintah Daerah

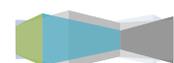
5. Masterplan penanganan PSU masih belum ada
6. Belum terpenuhinya anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan validasi data administrasi yang terbaru
2. Penguatan petunjuk teknis (Juknis) rehabilitasi rumah tidak layak huni
3. Menginventarisir fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Menganggarkan perencanaan masterplan PSU
5. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dan validasi data ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta instansi terkait
 2. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi
 3. Penelusuran dan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial
 4. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mencari potensi anggaran diluar APBD
- Pada tahun 2023 indikator RPJMD persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ditargetkan 75% dan realisasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Tanah Laut sebesar 97%, peningkatan rumah



tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ini merupakan sinergitas yang antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2023 berdasarkan perhitungan data dari Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman jumlah rumah layak huni adalah 106.004 unit dan jumlah keseluruhan rumah di Kabupaten Tanah Laut adalah 109.254 unit sehingga diperoleh persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau tahun 2023 adalah :

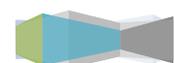
$$\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah keseluruhan rumah}} \times 100\%$$

$$= \frac{106.004}{109.254} \times 100\%$$

$$= 97\%$$

1.4.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 3 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan,



menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Pada tahun 2023 indikator RPJMD persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan ditargetkan 1% dan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan menjadi 0,21 % , pengurangan luasan permukiman kumuh ini merupakan sinergitas yang antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2023 berdasarkan perhitungan data dari Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 78,74 Ha, sedangkan luasan kota Pelaihari adalah 37.945 Ha sehingga diperoleh data persentase luasan kumuh di kawasan perkotaan tahun 2023 adalah :

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

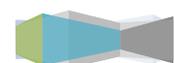
$$= \frac{\text{Luas permukiman kumuh}}{\text{Luas perkotaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{78,74 \text{ Ha}}{37.945 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 0,21\%$$

1.4.4. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 4 persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana

Terhadap pencapaian sasaran strategis nomor 4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023, melaksanakan kegiatan rehabilitasi pasca bencana melalui Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi



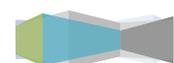
Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dimana dalam program ini sudah melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% (3 unit), dengan sistem belanja bahan-bahan bangunan konstruksi beserta dengan upah tukang nya.

Sedangkan Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tabel berikut :

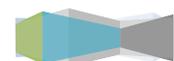
Tabel 3.2

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KEPALA DINAS						
1	Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan	1	penghargaan kebersihan (skor)			
		2	Indeks kualitas air	58,62	53,57	91,38%
		3	Indeks Kualitas udara	92,05	95,84	104,12%
		4	Indeks kualitas tutupan lahan	41,78	44,27	105,96%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	5	Persentase Rumah Layak Huni	500 unit	3.250 unit	650%
		6	Persentase kawasan pemukiman kumuh			
IKU SEKRETARIS						
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, Keuangan dan pelaporan	7	Nilai SAKIP SKPD	80	80	100%
4	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	8	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	9	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
IKU PERENCANAAN						
6	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	10	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	6	6	100%



7	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	11	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3	3	100%
IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN						
8	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	12	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 Jenis	11 Jenis	100%
		13	Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian yang dilaksanakan	3	3	100%
9	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	14	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2000 Surat	2.246 Surat	112%
10	Merencanakan dan mengadakan penyebaran informasi pembangunan daerah	15	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	3 dokumen	3 dokumen	100%
11	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	16	Jumlah aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	100%
12	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	17	Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi	1 kali pameran (teknologi tepat guna)	1 kali pameran dan akun sosial media (memberikan informasi publik)	100%
IKU KEUANGAN						
13	Merencanakan, menyusun dan membayar gaji dan TPP PNS dan PPPK		Jumlah Pembayaran Gaji dan TPP yang dibayar	55 orang	55 orang	100 %
14	Menyusun laporan keuangan SKPD		Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
IKU KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS						
14	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	18	Volume sampah yang terkelola di TPA	36.898,69	17.264,50	47%
		19	Volume sampah yang terkelola 3R	15.813,73	5387,49	34,07%
15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH	20	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen AMDAL	100	100	100%



16	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	21	Persentase pengelolaan Pengaduan bidang lingkungan hidup	4 Pengaduan	8 Pengaduan	200%
----	---	----	--	-------------	-------------	------

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

17	Meningkatnya kualitas sarpras pengelola sampah	22	Persentase sarpras pengelola sampah dalam kondisi baik	55	20	36%
18	Menurunnya timbunan sampah	23	Jumlah timbunan sampah	52.712,42	22.651,99	43%
19	Meningkatnya luasan TPS 3R	24	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%
20	Meningkatnya peran masyarakat pengelolaan sampah 3R	25	Persentase bank sampah yang aktif	34	20	58,82%

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

21	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	26	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	18	18	100%
		27	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	82	84	102%
22	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	28	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	10	14	140%
23	Melakukan penerapan sanksi administratif	29	Jumlah sanksi administratif	0	0	0%

IKU SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

24	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	30	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	4	8	200%
25	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	31	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	4	8	200%
26	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang LH	32	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	4	8	200%
27	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut Pengaduan	33	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	4	7	175%

IKU KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

28	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	34	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,00%	77.30 %	95.43%
	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	35	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	-	-	-
	Meningkatnya pemulihan pencemaran	36	Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak	-	-	-



	dan/atau kerusakan lingkungan hidup		memenuhi ambang kritis			
--	-------------------------------------	--	------------------------	--	--	--

IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

29	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	37	jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 dokumen	1 dokumen	100%
30	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	38	jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%
31	Meningkatnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase capaian pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	39	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

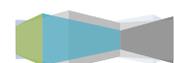
IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

32	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara ambient	40	Jumlah sungai yang dibersihkan	-	-	-
33	Melaksanakan pengujian kualitas air	41	Jumlah uji kualitas air	2 kali	2 kali	100%
34	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	42	Jumlah uji kualitas udara ambient	2 kali	2 kali	100%
35	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	43	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 kecamatan	11 kecamatan	100%

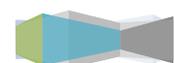
IKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU & JABATAN FUNGSIONAL UMUM

36	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	44	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	-	-	-
37	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	45	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	-	-	-
38	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	46	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100%

IKU KABID TATA LINGKUNGAN



39	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	47	Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	100%	100%	100%
		48	Persentase persetujuan lingkungan	100%	100%	100%
IKU SUB KOORDINATOR INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS						
40	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	49	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
41	Melaksanakan Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	50	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
IKU SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP						
42	Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup	51	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
IKU SUB KOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN						
43	Melaksanakan Penyusunan Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	52	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
44	Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana	53	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana	100% (3 Unit)	100% (3 Unit)	100% (3 Unit)
45	Kualitas PSU	54	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana			
IKU SUB KOORDINATOR TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA						
46	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	55	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
47	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	56	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 KK	325 KK	65%



48	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	57	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	3.250 Unit	650%
----	---	----	------------------------------------	----------	------------	------

IKU SUB KOORDINATOR TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

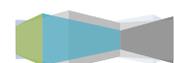
49	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah Rumah	58	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	325 KK	65%
50	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	59	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	5 KP	71,43 %
51	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	60	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	5 KP	71,43 %
52	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	61	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	500 Unit	570 Unit	114%
53	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	62	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	11 Rekomendasi izin mendirikan rumah	157%

IKU KABID TATA KOTA

54	Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	63	Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara	32 Taman dan 3 RTH	32 Taman dan 3 RTH	100%
55	Penarikan retribusi pemakaian fasilitas olah raga yang ada di RTH	64	Nilai retribusi yang berhasil di dapatkan	16.800.000	19.100.000	113%

IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN

56	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	65	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	52.712,42 Ton	37.126,26 Ton	70,5%
57	Melakukan pengolahan sampah di TPA	66	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	17.250 Ton	15.782,13 Ton	91,49%
58	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	67	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
59	Melaksanakan data pengolah sampah di Masyarakat	68	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
60	Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota	69	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
61	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	70	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	78 unit	78 unit	88 unit (100 %)
62	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	71	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	52 buah sarpras (100%)	52 buah sarpras (100%)	100%



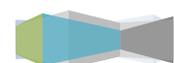
63	Menurunnya timbunan sampah	72	Jumlah timbunan sampah	52.712,42	22.651,99	43%
64	Meningkatnya luasan TPS 3R	73	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%

IKU KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

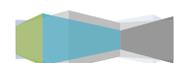
65	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	74	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	984	1081	109,85%
66	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	75	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	9	8	89%
67	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB	76	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	24	24	100%
68	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab	77	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12	12	100%
69	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	78	Nilai retribusi jasa uji Lab	500.000.000	525.215.000	105%

IKU KEPALA TU LABORATORIUM LINGKUNGAN

70	Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB	79	Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	2	2	100%
71	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	80	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5	5	100%



		11	Volume sampah yang terkelola 3R	15,813.73	5387.49	34.07	
7	Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH	12	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen amdal	100	100	100%	
8	Meningkatnya pengelolaan pengaduan LH	13	Persentase pengelolaan Pengaduan bidang lingkungan hidup	4	4	100%	
IKU KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
9	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH	14	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,00%	77,30%	95,43%	KABID P3
		15	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	-	-	-	
		16	Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	-	-	-	
IKU KABID TATA LINGKUNGAN							
10	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	17	Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	100%	100%	100%	KABID TATA LINGKUNGAN
		18	Persentase Persetujuan Lingkungan	100%	100%	100%	
IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
11	Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana	19	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana	100%	100% (3 unit)	100%	KABID PERKIM
12	Kualitas PSU	20	Persentase luas wilayah yang PSU nya standar	-	-	-	
IKU KABID TATA KOTA							
13	Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	21	Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara	32 Taman dan 3 RTH	32 Taman dan 3 RTH	100%	KABID TATA KOTA
14	Penarikan retribusi pemakaian fasilitas olah raga yang ada di RTH	22	Nilai retribusi yang berhasil di dapatkan	16.800.000	19.100.000	113%	
IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN							
15	Melakukan pengolahan sampah	23	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang	52.712,42To	37.126,26	70.5%	KA UPT



KEBERSIHAN

	dan limbah rumah tangga		dikelola	n	Ton	
16	Melakukan pengolahan sampah di TPA	24	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	17.250 Ton	15.782,13 Ton	91.49 %
17	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	25	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	11 Kecamatan	11 kecamatan	100%
18	Melaksanakan data pengolah sampah di Masyarakat	26	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	11 kecamatan	11 kecamatan	100%
19	Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota	27	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	11 kecamatan	11 kecamatan	100%
20	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	28	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	78 Unit (2 Armada Roda 2, 8 Unit Kontainer Sampah, 40 Buah Tempat Sampah 3 Warna, 25 Tempat Sampah Besar, 2 Buah Bangunan Pembakar Sampah Domestik, 1 Buah Halte)	78 Unit (2 Armada Roda 2, 8 Unit Kontainer Sampah, 40 Buah Tempat Sampah 3 Warna, 25 Tempat Sampah Besar, 2 Buah Bangunan Pembakar Sampah Domestik, 1 Buah Halte)	88 Unit (100%)
21	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	29	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	52 unit	52 unit	100%
22	Menurunnya timbunan sampah	30	Jumlah timbunan sampah	52,712.42	22,651.99	43%
23	Meningkatnya luasan TPS 3R	31	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%
24	Meningkatnya peran masyarakat pengelolaan sampah 3R	32	Persentase bank sampah yang aktif	34	20	58.82

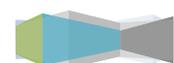
IKU KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

25	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	33	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	984	1081	109.85%
26	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	34	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	9	8	89%
27	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB	35	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	24	24	100%
28	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab	36	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12	12	100%

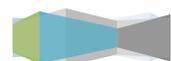
KA UPT LAB



29	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	37	Nilai retribusi jasa uji Lab	500,000,000	525,215,000	105%	
IKU KEPALA TU LABORATORIUM LINGKUNGAN							
30	Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB	38	Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	2	2	100%	KA TU LAB
31	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	39	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5	5	100%	
IKU PERENCANAAN							
32	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	40	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	6	6	100%	PERENCANAAN
33	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	41	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3	3	100%	
IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN							
34	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	42	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 Jenis	11 Jenis	100%	UMPEG
		43	Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian yang dilaksanakan	3	3	100%	
35	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	44	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2000 Surat	2.246 Surat	112%	
36	Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	45	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	3 dokumen	3 dokumen	100%	
	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	46	Jumlah aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	4668 aset yang tercatat	100%	
37	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	47	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi	1 kali pameran (teknologi)	1 kali pameran dan akun sosial media (100%	



				tepat guna)	memberikan informasi publik)		
IKU KEUANGAN							
38	Merencanakan dan menyusun Pembayaran Gaji PNS, PPPK dan Tunjangannya	48	Jumlah pembayaran gaji dan tpp yang dibayar tiap bulan	55 orang	7.171.899.551	100 %	KEUANGAN
39	Menyusun laporan keuangan SKPD	49	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 dokumen	21.612.793	100 %	



2 Eselon II

Untuk menggambarkan realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini. Analisa capaian 15 sasaran strategis dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran

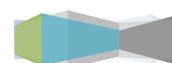
Terdapat 2 (dua) sasaran strategis *Kepala Dinas* yang diukur melalui 6 (enam) indikator, sasaran strategis nomor 1 dan 2 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut :

2.2.1. Target dan realisasi Sasaran strategis dan indikator Kinerja Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KEPALA DINAS						
1	Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan	1	penghargaan kebersihan (skor)			
		2	Indeks kualitas air	58,62	53,57	91,38%
		3	Indeks Kualitas udara	92,05	95,84	104,12%
		4	Indeks kualitas tutupan lahan	41,78	44,27	105,96%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	5	Persentase Rumah Layak Huni	500 unit	3.250 unit	650%
		6	Persentase kawasan pemukiman kumuh			

Tabel Perbandingan Kinerja Kepala Dinas 2023 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2023		
			2018	Target	Target	2021	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan	penghargaan kebersihan (skor)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	1 Penghargaan (Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	-	0%
		Indeks kualitas air	51	50	60,67	58,42	58,62	53,57	91,38%



		Indeks Kualitas udara	90,88	90,68	91,29	91,85	92,05	95,84	104,12 %
		Indeks kualitas tutupan lahan	-	-	-	41,58	41,78	44,27	105,96%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	Persentase Rumah Layak Huni	63,6% (318 Unit)	124,2% (621 Unit)	43,60% (218 Unit)	99,80% (499 Unit)	100% (500 Unit)	65% (325 Unit)	65%
		Persentase kawasan pemukiman kumuh							

Tabel Perbandingan Nilai IKA Provinsi Kalimantan Selatan

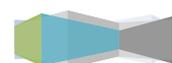
No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan	Indeks Kualitas Air	51,43	55,31	51,47	54,75	54,63	55,64

Tabel Perbandingan Nilai IKU Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan	Indeks Kualitas Udara Ambient	87,75	88,78	88,93	89,15	89,52	92,85

2.1 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja **Sasaran Strategis nomor 1 Meningkatkan kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan** sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan dan analisa pencapaian sasaran strategis dengan tiap indikator kinerja utama akan di



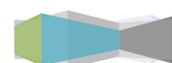
jelaskan di bawah ini

2.1.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan (skor)

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

a. Penghargaan Adipura

Program Adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (Good Environment Governance). Penilaian Adipura di Tanah Laut sejak tahun 2012 terlaksana dengan baik karena ditunjang dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan, kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dinas/instansi terkait sangatlah perlu dibina dan dijalin secara terus menerus dan berkesinambungan, agar lingkungan menjadi baik perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai lingkungan yang bersih dan teduh. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan



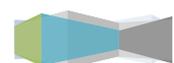
Dinas/Instansi terkait saja melainkan juga tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat untuk menuju lingkungan yang baik agar penghargaan Adipura tercapai . meskipun penilaian adipura sampai bulan Desember 2023 belum dilaksanakan, DPRKPLH tetap melakukan upaya untuk pencapaian lingkungan yang bersih, diantaranya :

- Melakukan pembinaan Bank Sampah di setiap Kecamatan
- Melakukan pembinaan masyarakat agar lebih sadar lingkungan
- Inovasi pengolahan sampah berupa pengolahan sampah menjadi pupuk padat menjadi pupuk organik cair selain itu melakukan inovasi berupa olah limbah industri menjadi pakan ternak
- Inovasi pengolahan sampah rumah tangga menjadi bahan makanan maggot sebagai makanan ternak ayam dan ikan.

Tabel Penghargaan Penghargaan Adipura Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2012-2021)

67

No	SKPD	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Kantor Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2012
2	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2013
3	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2014
4	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	KLHK	2017
5	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	KLHK	2018



6	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	Provinsi	2019
7	KLHK tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19			2020
8	KLHK tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19			2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Pada Renstra 2018-2023 sampai dengan 2023 DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut menargetkan menerima penghargaan Adipura di setiap tahunnya namun pada tahun 2020 dan 2021 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19 sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai .

Penghargaan Adiwiyata

Pengertian Adiwiyata atau biasa disebut Green School adalah satu diantara berbagai program kementerian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan akan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2013 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah adiwiyata yaitu suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dalam adiwiyata sendiri memiliki makna sebagai satu tempat yang baik dan ideal yang diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Hal ini menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju pada cita pembangunan berkelanjutan.

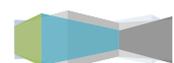
Dalam upaya memperoleh penghargaan adiwiyata DPRKPLH didukung oleh 4 SDM yang terdiri dari Kabid P2LH, Kasi Peningkatan Kapasitas LH, 1 orang staf pelaksana (Pengelola Lingkungan) dan 1 orang PTT. Sedangkan anggaran yang untuk mendukung indikator tersebut sebesar Rp 63.028.006,00.



Berikut data perolehan Penghargaan Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2012-2021

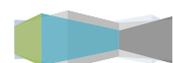
Tabel Penghargaan Penghargaan Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2012-2023)

No	Penerima Adiwiyata	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	SDN Atu Atu	Adiwiyata Mandiri	KLHK	2015
2	SMK-PP Tanah Laut	Adiwiyata Mandiri	KLHK	2017
3	SMAN 1 Jorong	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
4	SMAN 1 Kintap	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
5	SMPN 2 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
6	SMPN 7 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
7	SMPN 2 Bati - Bati	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
8	SMPN 1 Bati - Bati	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
9	SMPN 2 Panyipatan	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
10	SDN Angsau 3	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
11	SMPN 1 Jorong	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
12	SDN Pabahanan	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017



13	SDN Angsau 4	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
15	SMAN 1 Jorong	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
16	SMKN 1 Pelaihari	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
17	SMP1 Batu Ampar	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2018
18	SMP 5 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2018
19	SMAN 1 Kintap	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
20	SMAN 1 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2021
21	Waladun Sholeh	Adiwiyata Kabupaten	Kabupaten	2023
22	MAN IC Tanah Laut	Adiwiyata Kabupaten	Kabupaten	2023
23	SDIT ASSALAM Pelaihari	Adiwiyata Kabupaten	Kabupaten	2023
24	UPTD SD Negeri 2 Riam Adungan	Adiwiyata Kabupaten	Kabupaten	2023

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memperoleh penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga mengharuskan sekolah-sekolah melakukan pembelajaran secara Daring. hal ini menjadikan kesulitan pada pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah. Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n** adalah sebagai berikut :



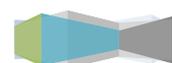
1. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan.
2. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas kebersihan sungai
3. Masih kurangnya jumlah SDM/ tenaga lapangan untuk posisi teknis PJU lapangan
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU
5. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan
6. Wilayah area kerja yang luas dan tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
7. masih kurang maksimalnya koordinasi antar SKPD dalam hal pembinaan sekolah adiwiyata.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak BKPSDM dalam permohonan penambahan tenaga PNS maupun PTT
2. Optimalisasi koordinasi dengan pihak Bappeda dan BPKAD dalam upaya pemenuhan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU
3. Lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan.
4. Koordinasi akan lebih ditingkatkan dengan SKPD terkait, baik itu dinas Pendidikan, Departemen Agama, Dinas Kesehatan sampai dengan kecamatan.

2.1.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Indeks kualitas air

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Indeks kualitas air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah

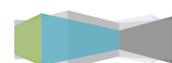


Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Pada tahun 2023 melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air. Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2022 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai menurut Perda RPPLH tahun 2021 - 2051 adalah 60,77 sedangkan hasil yang dicapai pada tahun 2023 adalah 53,57. Sedangkan berdasarkan Renstra tahun 2018 - 2023 target IKA yang akan dicapai adalah 58,62 untuk tahun 2023. Perubahan target IKA pada Perda RPPLH dikarenakan terdapat perubahan rumus perhitungan nilai IKA dimana sebelumnya memakai 7 parameter sedangkan peraturan yang baru memakai 8 parameter sehingga target nilai IKA diperbaiki di Perda RPPLH yaitu 60,77. Dengan demikian indeks kualitas Air belum berhasil memenuhi target tahun 2023

Indeks Kualitas Udara (skor)	92,10	92,05	95,84	104,12%
Indeks Kualitas Air (skor)	55,38	58,62	53,57	91,38%

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis



nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, beserta seluruh staf dibawahnya. Anggaran untuk mendukung pencapaian indicator ini sebesar Rp 263.560.469

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga dan mengelola kualitas air melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas air sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas air dan udara ambient pada musim kemarau dan musim penghujan.

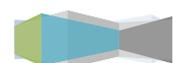
Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 diperoleh dari hasil

Pemantauan kualitas air sungai pada 6 lokasi sungai yaitu :

- ✓ Sungai Tabunio
- ✓ Sungai Kintap
- ✓ Sungai Asam-Asam
- ✓ Sungai Maluka
- ✓ Sungai Sabuhur
- ✓ Sungai Swarangan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Index Kualitas Air** adalah sebagai berikut :

- Peningkatan jumlah kegiatan/ usaha yang berpotensi



menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan khususnya pencemaran air

- Kesadaran masyarakat dan penanggungjawab kegiatan/usaha masih rendah.
- Kurangnya ketaatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup

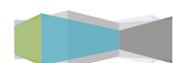
Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Memperketat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
3. Dukungan pemerintah daerah pada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan serta dapat memenuhi jumlah parameter wajib yang dipersyaratkan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air.

Untuk mendukung pencapaian nilai Indeks Kualitas Air, telah dilaksanakan pengadaan 1 paket alat pemantau kualitas air Online dan Otomatis (ONLIMO) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dari Kemnetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Alat tersebut dibangun di Intake PDAM di Kecamatan Bajuin. Pemasangan alat ONLIMO di Intake PDAM juga dapat membantu untuk mengetahui kualitas air baku PDAM.

Rencana aksi yang dilakukan:

1. Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air 74
2. Membuat edaran tentang mengelola sampah dan limbah
3. Membuat edaran tentang menjaga Kebersihan dilingkungan kantor,perumahan,sekolah,pasar



2.1.3. **Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks kualitas udara ambient**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks kualitas udara ambient sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Angka Indeks Kualitas Udara diperoleh dari perhitungan indeks kualitas udara yang mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (*sumber: IKLH Indonesia, 2014*) .

$$\text{Persamaan Indeks Udara IKLH} = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Keterangan Rumus :

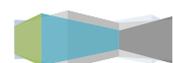
I_{eu} = rata rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantaun dibagi NO₂ Ref EU).

Indeks kualitas Udara merupakan hasil dari pemantauan kualitas udaradengan parameter SO₂ dan NO₂.

Kriteria 4 lokasi pengambilan sample udara ambient

- Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan



bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

- Industri

Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara disekitar kegiatan industri. Jarak pemantauan tidak terlalu dekat dengan sumber emisi minimal 15 meter dari sumber

- Pemukiman

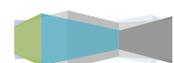
Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan disekitar pemukiman padat.

- Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada disekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan september. Pemasangan Alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler dilakukan pada 4 lokasi mewakili ,pemasangan alat dilakukan pada hari yang sama di 4 titik pantau, kemudian akan diambil kembali setelah dipaparkanselama 14 hari.

Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara Ambient yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan pencapaian indeks 91.85 pada tahun 2021 telah melebihi target tahun 2021 senilai 91,39 dan melebihi target Renstra 2018-2023 dimana sampai dengan tahun 2023 indeks kualitas air ditargetkan sebesar 87,75 dan telah melebihi target RPJMD sebesar 87,50. Sedangkan target IKU tahun 2021 sesuai Perda



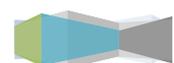
RPPLH yaitu 91,39.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara Ambient yang memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambient melalui edaran Bupati. melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas udara ambient sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas udara ambient pada musim kemarau dan musim penghujan.
 - a. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil ujilaboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili yaitu :

- ✓ Perkantoran (Kantor Bupati Tanah Laut)
- ✓ Padat Transportasi (Jl. A. Yani KM 123 Simpang Empat Asam-Asam)
- ✓ Industri (Depan PT. Indofood Tbk)



✓ Pemukiman (Depan Mesjid Al Ikhlas Komplek Kijang Mas Permai)

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Index Kualitas Udara** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil
2. Antrian Untuk pengujian kualitas udara ambien pada tahun 2021 masih belum bisa dilaksanakan di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut, sehingga perlu waktu untuk menunggu antrian pengujian di laboratorium yang lain.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara, misalnya masih terdapat pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas udaradi Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Pengendalian emisi dari sumbernya (sumber bergerak dan sumbertidak bergerak
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara ambient.

Rencana aksi :

Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas udara ambient.

2.1.4. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 4 Indeks kualitas tutupan lahan

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 3 Indeks



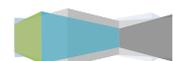
Kualitas Tutupan Lahan (skor) sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup beserta seluruh staf di bawahnya. Anggaran untuk mendukung pencapaian indicator ini sebesar Rp 74. 950.017 dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

Kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinilai menggunakan pendekatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur indikator yang digunakan untuk menilai adalah kualitas tutupan lahan. Kualitas tutupan lahan yang dinilai adalah luasan area bervegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah kabupaten yang diukur dalam satuan hektar berdasarkan kenampakannya pada citra satelit. . Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang indeks 90-100. Jenis penutup lahan yang digunakan untuk mendukung IKTL disajikan sebagai berikut.



Gambar 41. Penutupan Lahan yang Digunakan untuk Menghitung IKTL

Tabel Indeks Tutupan Lahan



No	Tahun	Target	Hasil
1	2022	41,68	44,08
2	2023	41,78	44,27

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan.
- b. Melakukan penanaman pohon.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks Kualitas tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

1. Sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau mengakibatkan hilangnya tutupan lahan di kabupaten tanah laut.
2. Lamanya durasi musim kemarau tahun tahun 2023 di Kab. Tanah Laut menyebabkan terjadinya penundaan penanaman pohon untuk menghindari bibit pohon yang mati setelah ditanam karena kekurangan air.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara illegal.
3. Memperbanyak kegiatan penanaman pohon.

Rencana aksi :

Membuat edaran tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan

2.2 **Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 2**

2.2.1. **Sasaran strategis nomor 2 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman dengan Indikator Kinerja Utama 1 Persentase Rumah**

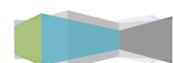


Layak Huni

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis nomor 2 yaitu meningkatnya kualitas perumahan layak huni dengan indikator Persentase rumah layak huni pada tahun 2023 terealisasi sebesar 65% (325 Unit), sampai dengan 2023 telah terealisasi sebanyak 2.312 unit rumah layak huni terbangun, sedangkan target Renstra sampai dengan 2023 terbangun 2.500 unit rumah layak huni sehingga pencapaian tahun 2023 masih belum mencapai target jangka menengah Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal



program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Tahun 2023 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program bedah rumah bagi warga yang berpenghasilan menengah ke bawah bagi rumah tidak layak huni dengan memberikan bantuan bahan bangunan dan biaya untuk mendirikan bangunan. Kegiatan Bantuan Sosial berupa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 ini dilaksanakan sebanyak 325 unit penerima bantuan dengan sumber dana, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.



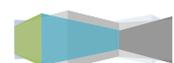
Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ini adalah jenis bansos uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa, Peningkatan Rumah Sederhana ini mengacu pada BNBA (By Name By Address)

Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator persentase rumah layak huni tidak mencapai target 100% hanya terealisasi 65% (325 Unit) dari yang ditargetkan sebanyak 500 unit. Anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini berasal dari APBD Murni sebesar Rp 6.142.500.000, dana dari APBD Provinsi sebesar Rp 700.000.000, sedangkan dana dari APBN sebesar Rp 340.000.000 dengan SDM sebanyak 12 orang

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama 1 Persentase rumah layak huni** antara lain :

83

1. Masih terdapat kendala pemenuhan syarat administrasi penerima bantuan
2. Kualitas rehabilitasi rumah yang kurang optimal
3. Ketepatan penyelesaian pekerjaan yang masih rendah
4. Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah
5. Masterplan penanganan PSU masih belum ada
6. Belum terpenuhinya anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
 1. Fasilitasi dan validasi data administrasi yang terbaru
 2. Penguatan petunjuk teknis (Juknis) rehabilitasi rumah tidk layak huni



3. Menginventarisir fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Menganggarkan perencanaan masterplan PSU
5. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dan validasi data ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta instansi terkait
2. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi
3. Penelusuran dan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mencari potensi anggaran di luar APBD

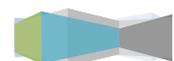
2.2.2. Sasaran strategis nomor 2 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman dengan Indikator Kinerja Utama 2 Persentase kawasan pemukiman kumuh

3. Eselon III

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu :



1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan lima (lima) kegiatan, dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.3.386.155.244,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.981.542.903,00 atau 88,05%
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu dengan anggaran Program sebesar Rp.308.942.886,00 dan terealisasi sebesar Rp 236.753.444,00 atau 77%
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media dengan 1 (satu) kegiatan yaitu dengan anggaran Program sebesar Rp.15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.935.000,00 atau 99.57%

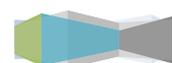
Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 24 orang.

Sedangkan Tahun 2020 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu:

- 1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.5.890.157.169,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.834.314,726,00 atau 99.05%
- 2 Program Pemenuhan,Peningkatan Sarana/Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.686.172,397,00 dan terealisasi sebesar Rp 534.356.565,00 atau 77.87%
- 3 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Peayanan SKPD dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.19.995.600,00 pada APBD murni namun dilakukan refocusing pada APBD Perubahan menjadi Rp0,00

karena adanya wabah covid-19, sehingga kegiatan yang melibatkan atau mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak dihindari.

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 24 orang dengan anggaran pada APBD murni 2021 sebesar Rp. 12.786.325.607,00 Anggaran perubahan Rp. 13.630.003.062,00 Kenaikan sekitar 0,93%. Bila dibanding tahun 2020 mengalami kenaikan dari jumlah



anggaran sebesar 51,60% sedangkan jumlah SDM Kesekretariatan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU SEKRETARIS						
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, Keuangan dan pelaporan	7	Nilai SAKIP SKPD			
4	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	8	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	9	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Sekretaris 2022 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	71,9	80,70	80	80	80	80	100%
		Nilai RB	29,73	81,21	83	83	83	83	100%
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	--	---	------	------	------	------	------	------	------

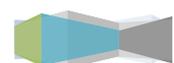
Tabel Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD.	Nilai SAKIP				

3.1.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 3

3.1.1. Sasaran strategis nomor 3 Meningkatkan kualitas perencanaan, Keuangan dan pelaporan dengan Indikator Kinerja Utama 7 Nilai SAKIP SKPD

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2021 dengan Capaian Tahun- Tahun Sebelumnya yaitu 2018 – 2020 telah mengalami peningkatan di 2018 nilai sakip 62,76, di tahun 2019 nilai sakip 71,9 di tahun 2020 nilai sakip 80,70 . Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatkan kualitas Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan indikator sasaran Nilai SAKIP SKPD capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 3 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini. Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian**



sasaran strategis nomor 3 dengan Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP SKPD antara lain :

1. Pengarsipan data-data pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya belum tertib
2. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan sesuai dengan penempatan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

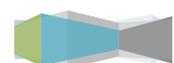
1. Sosialisasi tata cara pengarsipan data
2. Optimalisasi monitoring capaian kinerja dan realisasi kegiatan
3. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan SDM di perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tupoksi masing-masing

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pelaksanaan bimtek/pelatihan tata cara pengarsipan data yang baik dan benar.
2. Mengikutsertakan SDM untuk mengikuti sosialisasi/bimtek/workshop sesuai tupoksi penempatan dan tupoksi masing-masing.

3.1.2. Sasaran strategis nomor 4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor, dengan Indikator Kinerja Utama 8 Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2020 rata-rata mencapai 100%. Pada tahun 2021 Sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor dengan indikator sasaran Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan



Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 ,dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 4 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar antara lain :

1. Keterbatasan SDM berstatus PNS
2. Banyaknya Jumlah Barang Milik Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
3. Luasan wilayah penyebaran Barang Milik Daerah menghambat optimalisasi monitoring Aset secara
4. Keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana transportasi kedinasan

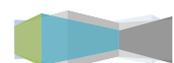
Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan PTT sebagai staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
2. Membuat matrik rencana monitoring Barang Milik Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
3. Optimalisasi anggaran dan sarana transportasi yang telah ada

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk usulan penambahan tenaga PNS yang sesuai kompetensi.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan anggaran
3. Mengajukan usulan permohonan penambahan kendaraan dinas.

3.2.1. Sasaran strategis nomor 4 Meningkatkan Tata Kelola administrasi



Umum dan Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Utama 8 Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2022 rata-rata telah mencapai 100%. Pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan indikator sasaran terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 dilaksanakan melalui Program/kegiatan/Sub Kegiatan :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor

5 dengan Indikator Kinerja Utama terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu antara lain :

- Keterbatasan SDM berstatus PNS

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Menempatkan PTT sebagai staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain :

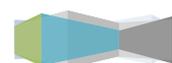
- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk usulan penambahan tenaga PNS yang sesuai kompetensi.

3.2. Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja.

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Penataan

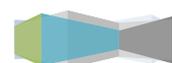


dan Peningkatan Kapasitas LH sebanyak 11 orang.

Sedangkan Tahun 2023 Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 3 Program dan Kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.553.568.703 dengan realisasi Program Rp.510.226.629 (92,17%) Untuk mencapai Program dan kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH sebanyak 11 orang terdiri 1 orang Kabid 2 orang sub koordinator dan 2 staf administrasi dan 6 staf teknis.

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPSITAS LINGKUNGAN TAHUN 2023

No	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota	59.464.163	57.037.176	95,92
2.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	139.460.633	137.369.076	98.50
3.	Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	282.115.539	228.124.111	90,00
4	Penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga	74.356.810	71.869.476	96,65

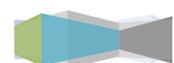


		Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/F ilantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
--	--	--	--	--	--

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS						
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	10	Volume sampah yang terkelola di TPA	36,898.69	17,264.50	47%
		11	Volume sampah yang terkelola 3R	15,813.73	5387.49	34.07
7	Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH	12	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen amdal	100	100	100%
8	Meningkatnya pengelolaan pengaduan LH	13	Persentase pengelolaan Pengaduan bidang lingkungan hidup	4	4	100%

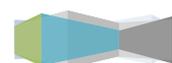


No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi					2022	Tahun 2023		
			2017	2018	2019	2020	2021		Target	Realisasi	Capaian
	kesadaran masyarakat tentang Pengelolaan sampah	sampah dimasyarakat/ sekolah	40% (2 bs)	220% (11 bs)	200% (10 bs)	100% (5 bs)	120% (6 bs)	120 % (6 BS)	100 % (5 bs)	120% (6 bs)	120% (6 bs)
4	Meningkatnya capaian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	Presentase Meningkatnya capaian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	12	2	13	0	0	4	2	4	4

- 3.3.1. **Sasaran strategis nomor 6 Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dengan Indikator Kinerja Utama 10 Volume sampah yang terkelola di TPA**
- 3.3.2. **Sasaran strategis nomor 6 Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dengan Indikator Kinerja Utama 11 Volume sampah yang terkelola 3R**
- 3.2.3. **Sasaran strategis nomor 7 Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH dengan Indikator Kinerja Utama 12 Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen amdal**

Pengawasan lingkungan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kegiatan usaha dan/ atau kegiatan mentaati ketentuan lingkungan yang mengiringi kewajiban pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan adalah terjadinya perubahan lingkungan yang menyangkut perubahan Geografi, Fisik, Kimia, Biologi, Sosial, ekonomi dan Budaya. Dampak Akibat dari suatu kegiatan yang berlangsung mempengaruhi perubahan ruang atau penggunaan lahan sehingga terjadi perubahan fungsi lingkungan berkenaan dengan pemanfaatan ruang. Demikian juga kegiatan usaha pada suatu tempat berpengaruh terhadap perubahan struktur Bentang tanah, Biologi berupa flora dan fauna dan perubahan Sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Fungsi pengawasan bertujuan bagaimana Kegiatan usaha yang diberikan izin usaha oleh Pemerintah diawasi untuk selalu taat terhadap ketentuan lingkungan . Di dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha berpedoman kepada Dokumen Lingkungan dan izin lingkungan / persetujuan lingkungan yang memuat pedoman pengelolaan lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan.. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan.

Pada tahun 2023 terdapat 115 perusahaan skala Amdal dan UKL-UPL yang aktif dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 18 Amdal dan 97 UKL-UPL yang izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan / persetujuan lingkungan adalah disetujuinya



Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup kegiatan usaha. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dan Pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan lingkungan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk taat memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan pedoman dokumen lingkungan yang mendasari perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pada saat pelaksanaan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan usaha bertujuan agar pelaku usaha taat terhadap ketentuan lingkungan. Adapun permasalahan lingkungan yang ditemukan dalam pengawasan pada umumnya masih ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak optimal.

Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

1. Kesesuaian dokumen dengan kondisi senyatanya di lokasi kegiatan, seperti : luasan, kapasitas produksi, peralatan, proses produksi, dll.
2. Kewajiban Pelaporan sebagai sarana pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif).
3. Pengendalian Pencemaran Air (air limbah produksi dan air limbah domestik) : persetujuan teknis pembuangan air limbah dan SLO, fasilitas pengelolaannya (IPAL), dll.
4. Pengendalian Pencemaran Udara : persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, fasilitas pengelolaannya (alat pengendali emisi)
5. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun : rincian teknis pengelolaan limbah B3, fasilitas pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3), dll

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2023 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan pengendalian pencemaran air khususnya untuk air limbah domestik terkait persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah domestik dan SLO dan pengendalian pencemaran udara terkait persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, serta pelaporan. Pada tahun 2023 sasaran strategis Kabid P2LH meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan kewenangan Kabupaten Tanah Laut dengan indikator :

1. Perusahaan skala Amdal yang diawasi : 18 Pelaku Usaha
 - Target : 18 Pelaku Usaha
 - Realisasi : 18 Pelaku Usaha
 - Yang Taat : 5 Pelaku Usaha
 - Yang tidak taat : 13 Pelaku Usaha
2. Perusahaan Skala UKL-UPL yang diawasi : 83 Pelaku Usaha
 - Target : 82 Pelaku Usaha
 - Realisasi : 83 Pelaku Usaha
 - Yang Taat : 5 Pelaku Usaha
 - Yang tidak Taat : 78 Pelaku Usaha
3. Perusahaan skala SPPL yang diawasi : 1 Pelaku Usaha (Tidak Taat)
4. Prosentase capaian pengawasan :
 - Perusahaan skala Amdal : $(18/18) \times 100 \% = 100 \%$
 - Perusahaan skala UKL-UPL : $(83/82) \times 100\% = 101,2\%$
5. Prosentase capaian ketaatan :
 - Perusahaan Skala Amdal : $5/18) \times 100\% = 27,78\%$
 - Perusahaan Skala UKL-UPL : $(5/83) \times 100\% = 6,02\%$

Pada tabel diatas di tahun 2023, dilakukan pengawasan terhadap 18 pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal , diantara 18 pelaku usaha tersebut sebanyak 5 pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal atau sebesar 27,78% dari pelaku usaha memiliki dokumen amdal yang dilakukan pengawasan. Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan dari tahun 2019-2023, rata-rata persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal meningkat namun pada tahun 2021 dan 2022 persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal mengalami penurunan, dan mulai meningkat lagi di tahun 2023.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dan Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL antara lain :

1. Adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang mewajibkan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (air limbah produksi maupun air limbah domestik) dan Surat Kelayakan Operasional untuk air limbah yang dihasilkan, dan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi dan Surat Kelayakan Operasional untuk emisi yang dihasilkan.

2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang

pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh

: Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.

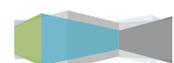
Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang

dihadapi adalah sebagai berikut :

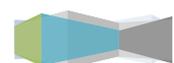
1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait regulasi baru tersebut dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Melakukan pembinaan dan mendorong agar perusahaan mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan mengikuti proper perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala prioritas), mengintensifkan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan amdal yang belum taat.



2. Perlunya tindakan tegas maupun kerjasama yang lebih kuat dari para pihak pemerintah (dalam hal ini tidak hanya instansi yang terkait saja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), namun seluruh elemen pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan tegas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan penataan lingkungan hidup.
3. Diperlukan juga tindakan penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
4. Serta perlu adanya kejelasan terhadap keberlanjutan permasalahan sanksi administrasi.
5. Perlu dilaksanakan sosialisasi lanjutan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan materi yang mengarah ke penerapan sanksi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Uraian	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (Amdal atau UKL-UPL)	capaian (Amdal atau UKL-UPL)	%	target (Amdal atau UKL-UPL)	capaian (Amdal atau UKL-UPL)	%	target (Pelaku Usaha)	Realisasi (Pelaku Usaha)	%
Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	20	21	105	15	15	100	15	13	87	20	21	105	25	25	100	10	14	140	18	18	100
Jumlah pelaku usaha yang memiliki UKL-UPL yang diawasi																			82	83	101,2

Pada tabel diatas di tahun 2023 dilakukan pengawasan terhadap 102 pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari 18 Amdal dan 83 UKL-UPL, dan 1 SPPL diantara 18 Amdal tersebut sebanyak 5 pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal atau sebesar 27,78%, dan dari 83 UKL-UPL tersebut sebanyak 5 pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL atau sebesar 6,02%.

Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan dari tahun 2017-2019, persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL mengalami penurunan di tahun 2018

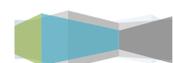
namun pada sejak tahun 2019- 2020 persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL- UPL mengalami kenaikan, dan di tahun 2021 dan 2022 ini kembali

mengalami penurunan.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kabid P2KLH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini

dilaksanakan oleh JFT Pengawas Lingkungan Hidup dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2022 penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Kabid P2LH tahun 2023 dengan capaian tahun- tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2022 rata-rata Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti mencapai 100% .

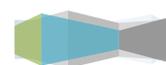


3.2.4. Sasaran strategis nomor 8 Meningkatnya pengelolaan pengaduan LH dengan Indikator Kinerja Utama 13 Persentase pengelolaan Pengaduan bidang lingkungan hidup

Pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator sasaran Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 200%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kabid P2LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Pengaduan Lingkungan Hidup Pengaduan Lingkungan merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak kondisi lingkungan yang diterima masyarakat. Dampak lingkungan adalah ketidak Harmonisan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga memberikan ketidaknyamanan kehidupan baik terhadap sistem alam maupun kepada kenyamanan hidup manusia.

Di Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas lingkungan merupakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat dibidang lingkungan. Lingkup kerjanya adalah Keterlibatan Pemerintah, swasta, dan peran masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan lingkungan untuk mengatur jalannya kegiatan usaha. Pihak swasta melaksanakan kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan masyarakat diharapkan mendapat manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan berupa peluang kerja dll. Namun dalam perjalanan pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan lingkungan maka akan terjadi dampak yang memberi respon lingkungan. Dampak lingkungan yang ada di masyarakat akan muncul pengaduan masyarakat sebagai respon gangguan lingkungan yang terjadi. Pengaduan masyarakat wajib difasilitasi dengan pengelolaan pengaduan dengan tujuan didapatkan solusi penanganan lingkungan atau penegakan hukum bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023 terdapat 8 kasus lingkungan yang muncul dan difasilitasi untuk



ditangani. Penanganan kasus dilakukan langkah pembinaan terhadap kegiatan usaha dalam optimalisasi pengelolaan lingkungan serta diberi saran rekomendasi untuk meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan. Pengaduan yang disampaikan masyarakat berkenaan dengan dampak lingkungan, seperti gangguan pencemaran udara, air, dan cemaran limbah yang biasanya ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Secara SOP pengaduan yang masuk wajib dikelola ditangani dengan memberikan mediasi penyelesaian permasalahan yang muncul di masyarakat. Jumlah pengaduan yang muncul berbanding terbalik dengan peningkatan pengawasan lingkungan terhadap semua kegiatan usaha, semakin taat kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan semakin kecil potensi dampak lingkungan yang muncul.

Sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, yang berbunyi :

“ Tahapan Pengelolaan Pengaduan terdiri atas :

- a. Penerimaan;
- b. Penelaahan;
- c. Verifikasi;
- d. Perumusan laporan hasil; dan
- e. Tindak lanjut hasil pengaduan.

a. Penerimaan Pengaduan

Langkah-langkah dalam penerimaan pengaduan lingkungan hidup sebagai berikut :

Registrasi/penomoran/kodefikasi

Setiap aduan yang masuk ke Pos Pengaduan Lingkungan Hidup akan dicatat dalam buku register pengaduan dan dibuatkan berita acara penerimaan pengaduan. pemberitahuan pengaduan diregistrasi.

Tanda terima

Sebagai bukti tanda terima bahwa pengaduan sudah masuk dalam registrasi pengaduan pada pos pengaduan lingkungan hidup maka dibuatkan surat pemberitahuan pengaduan diregistrasi.



b. Penelaahan

Pengaduan yang diregistrasi akan ditelaah untuk selanjutnya diklasifikasikan menjadi

pengaduan lingkungan hidup

pengaduan yang diklasifikasikan sebagai pengaduan lingkungan tetapi bukan merupakan kewenangan DPRKPLH maka pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan

Pengaduan non lingkungan hidup.

Dalam hal pengaduan yang diklasifikasikan sebagai pengaduan non lingkungan hidup maka DPRKPLH akan meneruskan pengaduan yang diterima kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan.

c. Verifikasi

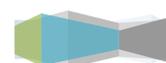
Pelaksana verifikasi

Verifikasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) kabupaten Tanah Laut, apabila tidak ada PPLHD di Kabupaten Tanah Laut maka verifikasi dilaksanakan oleh PPLHD di Provinsi Kalimantan Selatan atau oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). PPLH dapat berkoordinasi dengan PPLHD Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau PPLHD Kabupaten Tanah Laut. PPLHD provinsi Kalimantan Selat dapat berkoordinasi dengan PPLHD

d. Verifikasi

Pelaksana verifikasi

Verifikasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) kabupaten Tanah Laut, apabila tidak ada PPLHD di Kabupaten Tanah Laut maka verifikasi dilaksanakan oleh PPLHD di Provinsi Kalimantan Selatan atau oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). PPLH dapat berkoordinasi dengan PPLHD Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau PPLHD Kabupaten Tanah Laut. PPLHD provinsi Kalimantan Selatan dapat berkoordinasi



dengan PPLHD

Kabupaten Tanah Laut.

Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi dapat berupa data, fakta dan temuan yang :

- a. Memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan izin
- b. Melakukan pelanggaran (rekomendasi)
 - Sanksi Administratif;
 - Penyelesaian Sengketa (Perdata); atau
 - Dilakukan penyidikan (pidana)

e. Perumusan Laporan Hasil

Hasil kegiatan verifikasi dituangkan dalam Berita Acara verifikasi pengaduan yang ditandatangani oleh semua pelaksana verifikasi berisi data, fakta dan temuan lapangan serta rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak teradu. Selain itu di buat laporan hasil kegiatan verifikasi lapangan untuk disampaikan ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

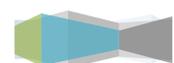
f. Tindak Lanjut Hasil Pengaduan

Rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak teradu akan di monitoring sejauh mana progress perkembangan upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Hasil monitoring tindak lanjut ini dituangkan dalam Berita Acara Monitoring dan ditandatangani oleh tim monitoring dan pihak teradu.

Pengelolaan pengaduan di bidang lingkungan hidup pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 pengaduan baru dan teregistrasi sebanyak 8 (delapan) kasus dan tindak lanjut pengaduan tahun sebelumnya sebanyak 1 (satu) kasus.

Data pengaduan Lingkungan Hidup tahun 2023

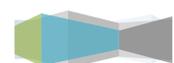
No	Nama Aduan	Asal/Sumber	Status	Ket
1	Dugaan tercemarnya air tambak oleh air saluran kebun sawit	Air saluran kebun PT. KJW Muara Kintap	Masih dalam monitoring	Telah dilakukan verifikasi pengaduan ke lokasi Saluran kebun PT. KJW yang



	yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran tambak menyebabkan ikan dan udang mati sehingga tambak tidak produktif lagi			bersebelahan dengan tambak masyarakat dan disampaikan surat permintaan laporan progress tindak lanjut dari PT. KJW Kintap, namun belum ada feedback dari pihak PT, KJW Kintap
2	Tercemarnya air sumur warga disebabkan rembesan air limbah dari sumur penampungan air limbah kegiatan pemotongan ayam	Kegiatan pemotongan ayam milik Bapak Zulkipli	Selesai	Telah dilakukan tindak lanjut berupa verifikasi pengaduan, pengambilan dan pengujian sampel air sumur warga dan rapat mediasi. Diperoleh kesepakatan bahwa kegiatan pemotongan ayam direlokasi untuk menghentikan berlanjutnya dampak pencemaran air sumur warga
3	Air sungai jilatan terlihat keruh kecoklatan diduga terjadi pencemaran dari limbah pabrik pengolahan kelapa sawit	Kegiatan pengolahan kelapa sawit	Selesai	Telah dilakukan tindak lanjut berupa verifikasi pengaduan ke lokasi sungai jilatan, tidak ditemukan indikasi adanya pencemaran terhadap air sungai jilatan
4	Lumpur tambang terbawa aliran air masuk ke area sawah dan kebun warga pada tahun 2024 menyebabkan tanaman padi dan tanaman kebun menjadi terganggu dan akhirnya mati	Kegiatan pertambangan batubara	Masih dalam monitoring	Telah dilakukan tindak lanjut berupa verifikasi pengaduan ke lokasi sawah milik warga yang terdampak, masih menunggu progress pelaksanaan saran tindak lanjut hasil verifikasi lapangan dari PT. Arutmin Tambang Asam-Asam
5	Januari 2023 – Juni 2023 ada kegiatan	Kegiatan pembuatan batu	Selesai	Telah dilakukan verifikasi pengaduan



	pengerukan tanah untuk bahan baku bata merah pada konsensi HGU PT. Jawa Indah	bata merah		ke lokasi HGU PT. Jawa Indah. Ditemukan adanya permasalahan penggunaan/pengusahaan lahan milik PT. Jawa Indah oleh beberapa kegiatan seperti pembuatan batu bata merah, perkebunan dan peternakan ayam, Akan dilakukan upaya penyelesaian terkait lahan tersebut secara persuasif.
6	sejak bulan April 2023 tercium bau menyengat yang bersumber dari proses pengovenan bulu ayam kegiatan industri PT. Borneo Feedmill Raya	Kegiatan pengolahan limbah bulu ayam menjadi pakan ternak	Selesai	Telah dilakukan tindak lanjut berupa verifikasi pengaduan, rapat mediasi dan monitoring tindak lanjut pengaduan. Pihak perusahaan telah melakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan uap oven yang menjadi sumber kebauan yang dikeluhkan warga.
7	Terbakarnya batubara pada area bekas galian tambang PT. PCMU di area konsesi PT. Al tambang Kintap menimbulkan asap yang berbau menyengat	Lubang bekas galian tambang batu bara PT. PCMU di area konsesi PT. Arutmin Site Kintap	Selesai	Telah dilakukan tindak lanjut berupa verifikasi lapangan, monitoring tindak lanjut penanganan kebakaran. Pihak PT. Arutmin Site Kintap telah melakukan upaya penimbunan area batu bara yang terbakar
8	Air sungai Pihaugan kondisinya keruh dan berlumpur, dugaan lumpur berasal dari kegiatan pertambangan	Dugaan bersumber dari kegiatan tambang batu bara PT. Arutmin Tambang Asam-Asam	Masih dalam monitoring	Telah dilakukan verifikasi pengaduan ke lokasi sungai Pihaugan dan lokasi Settling Pond PT. Arutmin Tambang



	batubara yang terbawa aliran masuk ke sungai, menyebabkan air sungai tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan MCK			Asam-Asam, Menunggu progress tindak lanjut pihak perusahaan terhadap saran-saran sesuai temuan hasil verifikasi lapangan.
9	Keluhan bau menyengat dampak kegiatan industri PT. Sinar Nusantara Industries (PT. SNI)	PT. Sinar Nusantara Industries	Masih dalam monitoring	Merupakan tindak lanjut penanganan-penanganan tahun sebelumnya. Pihak perusahaan masih melakukan upaya perbaikan terhadap bak kondensasi penangkap uap panas autoclave yang mengalami keretakan

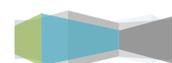
Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 6 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti antara lain :

140

1. Belum optimal koordinasi antar instansi-instansi maupun unit-unit yang terlibat dalam tim penanganan pengaduan lingkungan hidup kabupaten
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan masyarakat terkait penanganan pengaduan lingkungan hidup
3. Keterbatasan SDM

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi yang lebih optimal lagi antar instansi-instansi maupun unit-unit yang terlibat dalam tim penanganan pengaduan lingkungan hidup kabupaten, sehingga upaya penemuan dan penyelesaian kasus-kasus pengaduan lingkungan hidup bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
2. Optimalisasi monitoring pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pos Pengaduan dan penanganan pengaduan di bidang lingkungan hidup untuk

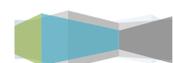


mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan.

3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola penanganan pengaduan lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- Sosialisasi terkait penanganan pengaduan lingkungan hidup kepada masyarakat agar meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan masyarakat.
- Koordinasi dengan SKPD terkait untuk penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pengaduan lingkungan hidup.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan apabila ada kegiatan diklat teknis penyelesaian sengketa lingkungan hidup.



3.3. KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup .Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

84

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program dan kegiatan yaitu :

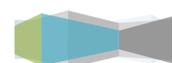
- Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp. 393.510.227,00 dan terealisasi sebesar Rp 348.322.380,00 atau 88.52 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH sebanyak 8 orang.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid P3LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Tabel Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
9	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH	14	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,00%	77,30%	95,43%
		15	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	-	-	-
		16	Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	-	-	-



3.3.1. Sasaran strategis nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH dengan Indikator Kinerja Utama 14 Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu

Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu dengan target 81,00% terealisasi 77,30% sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95,43 %. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kabid P3LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 dengan penjelasan lebih lanjut.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indikator 14 Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,00%	77,30%	95,43, %

3.3.2. Sasaran strategis nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH dengan Indikator Kinerja Utama 15 Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu

Indikator Kinerja Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Sasaran 9	Indikator 15			



1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	-	-	-
---	---	--	---	---	---

3.3.3. Sasaran strategis nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH dengan Indikator Kinerja Utama 16 Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis

Indikator Kinerja persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Sasaran 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indikator 16 Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	-	-

3.6.1. KABID TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Tata Lingkungan. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.

Untuk mencapai sasaran strategis ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

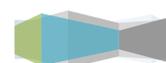
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup **Kegiatan** Rencana Perlindungan dan



Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota **Sub Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 110.462.612,00 dan terealisasi sebesar Rp 100.757.176,00 atau 91,21%.

2. **Program** Perencanaan Lingkungan Hidup **Kegiatan** Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 283.071.501,00 dan terealisasi sebesar Rp 263.776.678,00 atau 93,18%
3. **Program** Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup **Kegiatan** Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan **Sub Kegiatan** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 148.452.253,00 dan terealisasi sebesar Rp. 132.837.450,00 atau 89,48%.
4. **Program** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) **Kegiatan** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan **Sub Kegiatan** Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp.106.206.285,00 dan terealisasi sebesar Rp. 101.629.206,00 atau 95,69%.

Untuk mencapai sasaran ini, Bidang Tata Lingkungan didukung dengan SDM sebanyak 8 (Delapan) orang dan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar Rp 648.192.651,00 dan anggaran yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 599.000.510,00 atau 92,41% dengan capaian rata-rata indikator pada Bidang Tata Lingkungan sebesar 92,39%. Pada anggaran APBD tahun 2022 bidang Tata Lingkungan memiliki anggaran sebesar Rp 162.055.850,00 Terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 486.136.801,00 atau 399,9%.

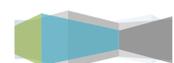


Pada Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Sub Kegiatan pada Bidang Tata Lingkungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menunjuk Kepala Bidang Tata Lingkungan selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut nomor 900/03/DPRKPLH/I/2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Januari 2023.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Capaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kabid Tata Lingkungan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KABID TATA LINGKUNGAN						
10	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	17	Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	100%	100%	100%
		18	Persentase Perrsetujuan Lingkungan	100%	100%	100%



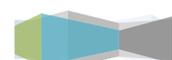
**Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Tata Lingkungan Tahun 2023 dengan
Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2023		
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	apaian
1	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	6 Desa	5 Desa	200% (12 Desa)	100%	100%	100%
		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	2 dokumen, Laporan	Dokumen, 1 Laporan	100% (4 Dokumen)			
		Persentase Persetujuan lingkungan (SKKL, PKPLH, SPPL) dan pertimbangan teknis	285	138	3 SKKL 5 PKPLH 30 SPPL 5 Pertek	100%	100%	100%
		persentase persetujuan lingkungan	100%	100%	100%			

3.4.1. Sasaran strategis nomor 10 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan Indikator Kinerja Utama 17 Persentase Kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan

Pada Tahun 2023 Sasaran Strategis Meningkatnya Wilayah Bebas Pencemaran Lingkungan dengan indikator :

Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan capaian kinerjanya yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda yang bertindak sebagai Sub Koordinator Inventarisasi RPPLH dan KLHS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 188.45/245-KUM/2022 tentang Penugasan Pejabat Fungsional Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 3 Januari 2022 dan Pejabat Fungsional Umum Analis Lingkungan Hidup yang bertindak sebagai Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 824/30-SI/BKPSDM/I/2022 tentang Penugasan Pejabat Pelaksana Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 3 Januari 2022, dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini :

Kajian Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100 % dalam arti Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini sangat dimanfaatkan atau digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut seperti Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Pelaksanaan Program Kampung Iklim.. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dasar dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Hal ini karena Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen wajib dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di kabupaten/kota sehingga sangat di upayakan untuk dipenuhi. Analisa program atau kegiatan yang dapat mendukung dan mempertajam analisa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini adalah adanya program dan kegiatan pada SKPD teknis sesuai dengan bidang masing-masing untuk pemenuhan data dari Dokumen Kajian Lingkungan Hidup.

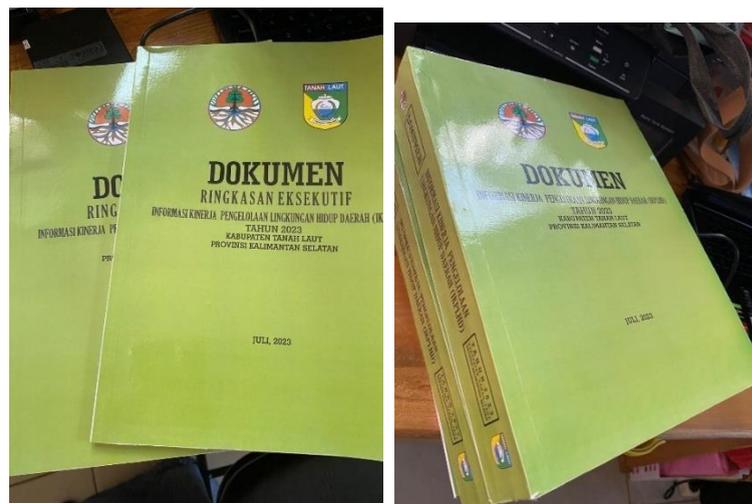


Foto Dokumen IKPLHD Tahun 2023

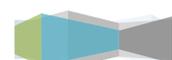




Foto Dokumen IKLH Tahun 2023

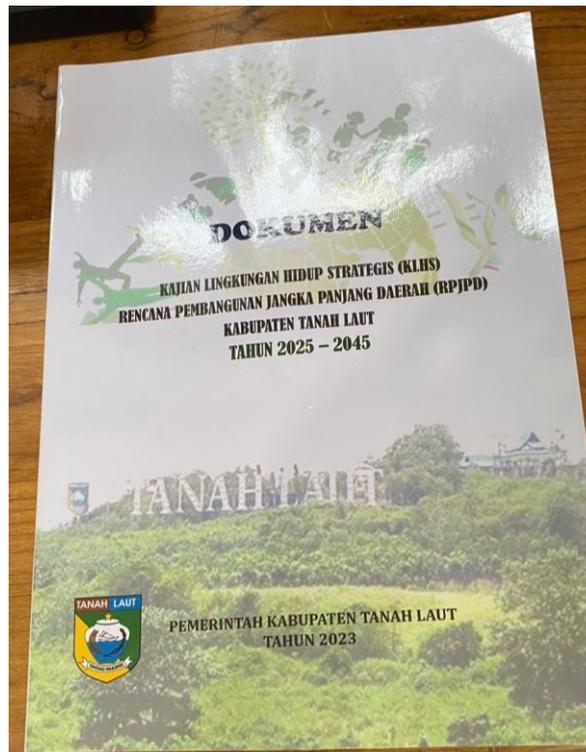


Foto Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045

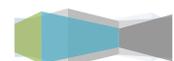




Foto Dokumen Inventarisasi GRK 2023

Program Kampung Iklim merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam upaya adaptasi dan mitigasi. Perubahan iklim di Indonesia yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pihak swasta, dan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut seperti yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/758-KUM/2023 Tanggal 11 Juni 2023 Perihal Penetapan Lokasi Kampung Iklim di Kabupaten Tanah Laut. Apresiasi Desa/Kelurahan Proklim yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah:

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KATEGORI
1	RW 04 Karang Taruna	Pelaihari	Lestari
2	Dusun 01 Asri Mulya	Jorong	Lestari
3	Sungai Bakar	Bajuin	Utama Tropy
4	Galam	Bajuin	Utama
5	Sumber Makmur	Takisung	Utama



NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KATEGORI
6	Sungai Rasau	Bumi Makmur	Madya
7	Batalang	Jorong	Madya
8	Jorong	Jorong	Pratama
9	Swarangan	Jorong	Pratama
10	Karang Rejo	Jorong	Madya



Foto Dokumen Proklam

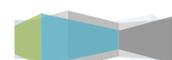


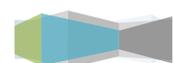
Foto Penerimaan Penghargaan Proklamasi

3.4.3. Sasaran strategis nomor 10 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan Indikator Kinerja Utama 18 persentase persetujuan Lingkungan

Persentase Persetujuan lingkungan capaian kinerjanya sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi 100% Dalam dokumen tersebut terdiri dari SKKL, PKPLH, SPPL, Persetujuan Teknis, dan SLO. Pencapaian ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk Dokumen Lingkungan Hidup. Selain itu, karena adanya kebutuhan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban dan menyesuaikan perijinan berusahnya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda yang berperan sebagai Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/246-KUM/2022 tentang Penugasan Pejabat Fungsional Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 3 Januari 2022 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini :

Persetujuan Lingkungan (SKKL, PKPLH, SPPL dan Persetujuan Teknis) merupakan dasar dalam memperoleh Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha dan Persetujuan Pemerintah bagi Instansi Pemerintah. Dalam pencapaian target tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi yaitu :

- a. Adanya pemenuhan kewajiban dari peraturan dan perundang-undangan terkait perijinan berusaha dan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- b. Semakin sadarnya pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- c. Semakin baiknya iklim investasi di Kabupaten Tanah Laut sehingga banyak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.



d. Semakin tertibnya proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut.

e. Semakin giatnya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

Analisa program atau kegiatan yang dapat menunjang dari capaian ini adalah semakin banyaknya program atau kegiatan sosialisasi, pengawasan dan penertiban pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha dan instansi pemerintah di Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan jaminan investasi di Kabupaten Tanah Laut.



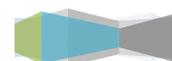
Foto Dokumen Persetujuan Lingkungan

3.5. KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program dan kegiatan yaitu :

1. Program Kawasan Permukiman dengan 1 (satu) kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan 1 (satu) sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Program sebesar Rp. 6.565.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.565.000.000 atau 100%.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan 1



(satu) kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan 2 (dua) sub kegiatan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 429.909.180, dimana teralisasi sebesar Rp. 412.727.840 atau 96% dan sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan anggaran sebesar Rp. 68.121.947.783 dan terealisasi sebesar Rp. 62.311.047.667 atau 91,46%

3. Program Pengembangan Perumahan dengan 1 (satu) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran program sebesar Rp. 118.640.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.322.970 atau 40,73%

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 15 orang.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

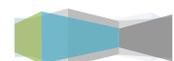
No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
11	Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana	20	Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana	100%	100% (3 unit)	100%
12	Kualitas PSU	21	Persentase luas wilayah yang PSU nya standar			

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi					Tahun 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya rumah layak huni	Presentasi rumah yang sehat dan layak								



	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	63,6% (318 Unit)	124,2% (621 Unit)	43,60% (218 Unit)	64,80% (324 Unit)	99,80% (499 unit)	100% (500 Unit)	65% (325 unit)	65%
2	Meningkatnya Kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	42,85% (3 KP)	200% (14 KP)	129% (9 KP)	142,85% (10 KP)	200% (14 KP)	100% (7 KP)	71,43 (7 KP)	71,43
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-	-	100%	100% (3 unit)	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2023 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

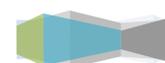


3.5.1. Sasaran strategis nomor 11 Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana dengan Indikator Kinerja Utama 20 Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah,



ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan indikator sasaran Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)) capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% (500 Unit) namun hanya terealisasi sebesar 65% (325 Unit). Dimana untuk untuk mencapai target ini bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Sumber APBD Kabupaten

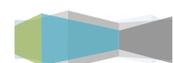
NO	URAIAN	LOKASI		UNIT	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)	
		KECAMATAN	DESA				
1	Bantuan Sosial Berupa Uang (Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni)	Jorong	Swarangan	11	22.500.000	247.500.000	
2		Jorong	Muara Asam-Asam	20	22.500.000	450.000.000	
3		Jorong	Asri Mulya	10	22.500.000	225.000.000	
4		Jorong	Sabuhur	10	22.500.000	225.000.000	
5		Jorong	Batalang	10	22.500.000	225.000.000	
6		Jorong	Karang Rejo	1	22.500.000	22.500.000	
Total				62		1.395.000.000	
7		Sumber dana APBD	Batu Ampar	Batu Ampar	10	22.500.000	225.000.000
8	Batu Ampar		Gunung Melati	10	22.500.000	225.000.000	



9	Kabupaten	Batu Ampar	Jilatan	10	22.500.000	225.000.000	
10		Batu Ampar	Jilatan Alur	1	22.500.000	22.500.000	
11		Batu Ampar	Damit	7	22.500.000	157.500.000	
			Total		38		855.000.000
12			Bati-Bati	Ujung	10	22.500.000	225.000.000
13			Bati-Bati	Liang Anggang	12	22.500.000	270.000.000
14			Bati-Bati	Bentok Darat	10	22.500.000	225.000.000
15			Bati-Bati	Kait-Kait	10	22.500.000	225.000.000
16			Bati-Bati	Sambangan	10	22.500.000	225.000.000
			Total		52		1.170.000.000
17			Kintap	Kintap Kecil	6	22.500.000	135.000.000
18			Kintap	Kintap Pura	6	22.500.000	135.000.000
			Total		12		270.000.000
19			Bajuin	Tebing Siring	4	22.500.000	90.000.000
20			Bajuin	Bajuin	10	22.500.000	225.000.000
21			Bajuin	Ketapang	4	22.500.000	90.000.000
			Total		18		405.000.000
22			Bumi Makmur	Handil Suruk	15	22.500.000	337.500.000
			Total		15		337.500.000
23			Tambang Ulang	Sungai Jelai	10	22.500.000	225.000.000
24			Tambang Ulang	Tambang Ulang	4	22.500.000	90.000.000
25			Tambang Ulang	Martadah	10	22.500.000	225.000.000
26			Tambang Ulang	Gunung Raja	10	22.500.000	225.000.000
			Total		34		765.000.000
27			Pelaihari	Karang Taruna	2	22.500.000	45.000.000
28			Pelaihari	Ambungan	10	22.500.000	225.000.000
29			Pelaihari	Kampung Baru	1	22.500.000	22.500.000
30			Pelaihari	Panggung	3	22.500.000	67.500.000
31			Pelaihari	Panggung Baru	2	22.500.000	45.000.000
32			Pelaihari	Telaga	1	22.500.000	22.500.000
33			Pelaihari	Pelaihari	1	22.500.000	22.500.000
			Total		20		450.000.000
34			Panyipatan	Tanjung Dewa	1	22.500.000	22.500.000
			Total		1		22.500.000
35			Takisung	Benua Lawas	10	22.500.000	225.000.000
36			Takisung	Ranggang Dalam	10	22.500.000	225.000.000
37			Takisung	Tabanio	1	22.500.000	22.500.000
		Total		21		472.500.000	
		TOTAL		273		6.142.500.000	

Tabel. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Sumber APBD Provinsi

NO	URAIAN	LOKASI		UNIT	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA			
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Sumber APBD Provinsi	Bati-Bati	Bati-Bati	5	20.000.000	100.000.000
2		Bati-Bati	Bati-Bati	10	20.000.000	200.000.000
3		Total		15		300.000.000
4		Kurau	Sungai Bakau	5	20.000.000	100.000.000
4		Kurau	Handil Negara	5	20.000.000	100.000.000



5	Kurau	Padang Luas	5	20.000.000	100.000.000
	Total		15		300.000.000
6	Takisung	Batilai	5	20.000.000	100.000.000
	Total		5		100.000.000
	TOTAL		35		700.000.000

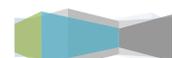
Tabel. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sumber APBN

NO	URAIAN	LOKASI		UNIT	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA			
1	Bantuan Stimulan	Kurau	Maluka Baulin	2	20.000.000	40.000.000
2	Perumahan Swadaya (BSPS)	Kurau	Tambak Karya	3	20.000.000	60.000.000
		Total		5		100.000.000
3	Sumber APBN	Panyipatan	Kuringkit	1	20.000.000	20.000.000
		Total		1		20.000.000
4		Takisung	Tabanio	1	20.000.000	20.000.000
		Total		1		20.000.000
5		Pelaihari	Angsau	1	20.000.000	20.000.000
6		Pelaihari	Panggung	4	20.000.000	80.000.000
7		Pelaihari	Pemuda	4	20.000.000	80.000.000
		Total		9		180.000.000
8		Tambang Ulang	Gunung Raja	1	20.000.000	20.000.000
		Total		1		20.000.000
		TOTAL		17		340.000.000

Dari total kesuruhan rencana/target perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 325 unit rumah terealisasi sebanyak 325 unit rumah.

Tabel. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Sumber APBD Kabupaten

NO	URAIAN	LOKASI		UNIT	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA			
1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Sumber APBD Kabupaten	Pelaihari	Panjaratan	3	10.506.500	31.519.500
		TOTAL		3		31.519.500



Gambar. Setelah dilakukan rehabilitasi



Gambar. Sebelum dilakukan rehabilitasi

Gambar. Sebelum dilakukan rehabilitasi



Gambar. Setelah dilakukan rehabilitasi



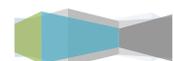
Gambar. Sebelum dilakukan rehabilitasi

Gambar. Setelah dilakukan rehabilitasi



Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10,11,12 Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Data dan Perencanaan Perkim (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda) dan Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda) dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023

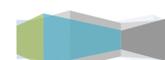
3.5.2. Sasaran strategis nomor 12 Kualitas PSU dengan Indikator Kinerja Utama 21 Persentase luas wilayah yang PSU nya standar



Pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator sasaran Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya 71,43% (5 KP) melalui program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Hal ini dikarenakan para pengembang sudah menyerahkan sertifikat fasum pada komplek perumahan yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah daerah khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat melakukan pemeliharaan/peningkatan PSU yang ada pada perumahan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen PSU	Realisasi (Meter/m2/Unit)	Target DPA (Meter/m2/Unit)	Ket.
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Komp.Bajuin Raya RT.04 RW.01 Desa Atu-atu Kec. Pelaihari	230	136.08693870107	Meter
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Griya Permata II RT.007 Dusun IV dan Jalan 55 RT.08 Desa Liang Anggang Kec. Bati – Bati	425	299.431993239246	Meter
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Istana Kita Kecamatan Pelaihari	178	136.0869387010	Meter
4	Peningkatan Komplek Griya Cahaya Asri Telaga Daim RT.3 kel. Karang Taruna	174	320.289764552646	Meter
5	Pemasangan dan Pengadaan Jaringan PJU Komplek Pilar Utama	23 Tiang Baru, 14 Jaringan Baru	23.2552546351151	Unit

program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPLH nomor 10,11,12 didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kasi Data dan Perencanaan Perkim (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda), dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2023 Kasi Data dan Perencanaan Perkim (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda) didukung 1 orang PNS dan 2 orang PTT



3.6. Kabid Tata Kota

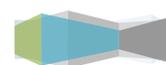
Bidang Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Tata Kota. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Tata Kota DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja.

Tahun 2020 untuk mencapai sasara ini telah dilaksanakan Program tata Kota dan Kebersihan dengan 3 (tiga) Kegiatan dengan anggaran Program sebesar **Rp 20.322.983.973,00** dan terealisasi sebesar **Rp 18.308.972.497,00** atau 90,09%. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 288 orang dengan anggaran pada APBD murni 2020 sebesar **Rp 25.084.389.460,00** namun karena adanya **wabah covid-19 terjadi recofusing anggaran** menjadi Rp 20.322.983.973,

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Tata Kota Dan Kebersihan sebanyak 228 orang.

Tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Tata Kota dan Kebersihan dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar **Rp 47.312.219.626,00** dan terealisasi sebesar **Rp 42.607.333.992,00** atau **92,20%**. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 228 orang dengan anggaran pada APBD perubahan 2021 sebesar **Rp 47.312.219.626,00** dengan capaian indikator pada bidang Tata Kota dan Kebersihan sebesar **92,20%** sedangkan jumlah SDM Bidang Tata Kota Dan Kebersihan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan. **Tahun 2022** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Tata Kota dan Kebersihan dengan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran Program sebesar **Rp 42.135.893.494** dan terealisasi sebesar **Rp 40.312.861.250** atau **96%**. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 73 orang sedangkan jumlah SDM Bidang Tata Kota Dan Kebersihan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Sedangkan tahun 2023 ada perubahan struktur organisasi yang awalnya Bidang Tata Kota dan Kebersihan berubah menjadi Bidang Tata Kota. Bidang Tata Kota memiliki



1 (satu) kegiatan yaitu, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) dengan anggaran sebesar Rp.3.322.000.300 dan terealisasi sebesar Rp3.022.848.363 atau 90 %. Untuk mencapai realisasi kegiatan tersebut, bidang tata kota disukung oleh SDM sebanyak 39 PTT, 15 Tenaga Bantu Lapangan dan 10 PNS.

Adapun beberapa pencapaian yang dilakukan oleh bidang Tata Kota yaitu merehabilitasi RTH Brigjend H. Hasan Basri khususnya lapangan *mini soccer*, rehabilitasi taman di kawasan pasar lawas dan 3 dokumen konsultan serta melakukan pembelian *street furniture* untuk melengkapi fasilitas pedestrian dan taman.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Tata Kota DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

:

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Tata Kota

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KABID TATA KOTA						
13	Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	22	Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara	32 Taman dan 3 RTH	32 Taman dan 3 RTH	100%
14	Penarikan retribusi pemakaian fasilitas olah raga yang ada di RTH	23	Nilai retribusi yang berhasil di dapatkan	16.800.000	19.100.000	113%

Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Tata Kota 2023 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi					Tahun 2023		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	-	90.40	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	-	90.40	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3.6.1. Sasaran strategis nomor 13 Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau dengan Indikator Kinerja Utama 22 Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara

Sasaran strategis indikator kerja utama Bidang Tata Kota yaitu Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau dengan jumlah 23 kawasan taman dan RTH, yaitu :

No	Nama RTH	Lokasi
(a)	(b)	(c)
1	RTH Kijang Mas Permai	Jl. Kolonel Soepirman
2	Bundaran dan Taman Kota Tanah Laut Membangun	Jl. A. Syairani
3	Pulau Jalan (Tugu PKK)	Jl. A. Yani KM 59
4	Tugu Hari Jadi Tanah Laut	Jl. A. Yani
7	RTH Masjid Al-Manar	Jl. Al-Manar
8	Taman Kijang Kencana	Jl. A. Yani
9	Tugu Kijang kawasan gunung Kayangan	Jl. A. Yani
10	taman median Jalan Majakeling	Jl. Majakeling
11	RTH Lapangan Hasan Basri	Jl. Gembira
12	Taman Al Manar 2	Jl. Al Manar
13	Alkah Kuburan Habaib	Jl. Dharma
14	Pasar Lawas	Jl. Veteran
15	Taman Depan Balairung Tuntung Pandang	Jl. A. Yani dan Jl. Pancasila
16	Taman Depan dan Samping Kuburan Muslimin	Jl A. Yani KM 59
17	Tugu Sapi Gunung Kayangan	Jl. A. Yani
18	Taman Depan Stadion Perstasi Kencana	Jl. A. Syairani
19	Taman Depan Bajuin Plaza	Jl. Kemakmuran
20	Taman DPRKPLH Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syukri
21	Median Jalan Pancasila	Jl. Pancasila
22	Median Jalan A. Yani	Jl. A. Yani
23	Tugu Perbatasan Makam Pahlawan	Jl. A. Yani



3.6.2. Sasaran strategis nomor 14 Penarikan retribusi pemakaian fasilitas olah raga yang ada di RTH dengan Indikator Kinerja Utama 23 Nilai retribusi yang berhasil di dapatkan

Sasaran strategis yang merupakan indikator kerja utama dari Bidang Tata Kota ada Penarikan Retribusi Pemakaian Fasilitas yang ada di RTH Brigjend H. Hasan Basri (Lapangan Mini Soccer RTH Brigjend H. Hasan Basri Pelaihari) target Rp. 16.800.000 /per tahun dengan realisasi retribusi Rp. 19.100.000 (memulai penarikan retribusi/ penyewaan lapangan pada awal bulan April tahun 2023),

dengan rincian retribusi sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah
1.	April	3.500.000
2.	Mei	5.300.000
3.	Juni	2.900.000
4.	Juli	800.000
5.	Agustus	500.000
6.	September	700.000
7.	November	3.100.000
8.	Desember	2.300.000
Total		19.100.000
		113%

4. ESELON 4

4.2. KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pada UPT Laboratorium Lingkungan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ke Laboratorium Lingkungan .Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja.

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Pengelolaan



Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 523.984.472,00 dan terealisasi sebesar Rp 489.069.776,00 atau 93 %. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada UPT Laboratorium Lingkungan sebanyak 14 orang.

Pada Tahun Anggaran 2023, UPT Laboratorium Lingkungan sistem keuangannya kembali bergabung dengan DPRKPLH dengan satu sub kegiatan yaitu Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pelayan dan pengujian laboratorium lingkungan.
Jumlah sampel yang dilayani laboratorium sesuai SOP sebanyak 1081 sampel , atau mencapai 109,85 % dari target 984 sampel. Pelayanan dan pengujian di laboratorium lingkungan sesuai dengan Perbup Nomor 151 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan.
2. Melakukan pengadaan peralatan dan bahan laboratorium
Pengadaan peralatan dan bahan laboratorium pada tahun 2023 , berupa pembelian alat kualitas air, kualitas udara, dan alat standar kalibrator. Kemudian diadakan bahan untuk kegiatan kantor lainnya seperti alat gelas laboratorium, bahan kimia cair dan padat.
3. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium
Pemeliharaan peralatan laboratorium ini berupa belanja kalibrasi yang dilakukan rutin karena merupakan kewajiban sebuah laboratorium. Pada tahun 19 Januari 2023, dilakukan kalibrasi alat terhadap 24 jenis alat yang terdiri dari 24 item yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Komite Akreditasi Nasional (KAN).
4. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia laboratorium
Personel laboratorium berjumlah 12 orang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi yang diperlukan di laboratorium. Dengan dilaksanakannya inhouse training dan pelatihan alat-alat yang dioperasikan.
5. Melakukan penarikan retribusi jasa uji laboratorium
Pada awal tahun anggaran target pendapatan retribusi jasa laboratorium adalah Rp. 1.000.000.000,00 kemudian pada anggaran perubahan dinaikkan menjadi Rp. 500.000.000,00.

Retribusi uji laboratorium lingkungan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.



525.215.000,00 dari target Rp. 500.000.000,00 atau mencapai 105%.

KESIMPULAN

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 target Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut tidak terlepas tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kinerja laboratorium yang mengutamakan pelayanan maksimal kepada seluruh calon pelanggan yang menggunakan jasa laboratorium lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPT Laboratorium

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN						
25	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	34	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	984	1081	109.85%
26	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	35	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	9	8	89%
27	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB	36	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	24	24	100%
28	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab	37	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12	12	100%
29	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	38	Nilai retribusi jasa uji Lab	500,000,000	525,215,000	105%



Tabel Perbandingan Kinerja Kepala UPT Laboratorium 2023 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2023		
			2019	2020	2021	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium Lingkungan	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	180 Sampel	350 sampel	896 sampel	984 sampel	984 sampel	1081 sampel	109,85 %
2	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	16 Jenis	11 Jenis	11 jenis	11 jenis	9 jenis	9 jenis	100%
3	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan	27 jenis	20 jenis	23 jenis	20 jenis	24 jenis	24 jenis	100%
4	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12 orang	12 orang	12 orang	13 orang	14 orang	233 14 orang	100%
5	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Nilai retribusi jasa uji Lab	Rp. 81.280.000	Rp. 155.750.000	Rp. 354.790.000	Rp. 1.134.074.225	Rp.500.000.000	Rp. 521.000.000	104,2 %

Pada tahun 2023 sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium yaitu :

1. Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan dengan indikator Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP capaian kerjanya melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 109,85% . Jumlah sampel yang diuji adalah 1081 sampel.



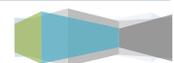




Foto – foto sampel dan bahan kimia di laboratorium



Pada tanggal 3 - 4 April 2023, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH mengadakan In House Training. Berikut adalah foto kegiatan In House Training tersebut



Pada tanggal 7 Februari 2023 UPT Laboratorium Lingkungan mengadakan Surveilen, yaitu kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap Laboratorium yang terakreditasi. Surveillance ini di lakukan oleh KLH melalui Tim Asesmen Surveilen Komite Akreditasi Nasional (KAN).





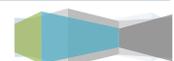
Pada tanggal 19 Januari 2023 UPT Laboratorium Lingkungan melakukan Pemeilhanaan Alat Kalibrasi Alat Laboratorium oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Komite Akreditasi Nasional (KAN).





REKAPITULASI PENGADAAN ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM, SARANA DAN PRASARANA PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DPRKPLH

No	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN	VOLUME	PAGU	Keterangan
						236
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan - Bahan Kimia	1 Tahun	Rp.97.571.498	



		5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1 Tahun	Rp.4.934.561	
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 Tahun	Rp. 7.721.161	
		5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	Rp. 43.200.000	
		5.1.02.01.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa acara dan Panitia	1 Tahun	Rp. 22.500.000	
		5.1.02.01.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1 Tahun	Rp. 259.200.000	
		5.1.02.01.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	1 Tahun	Rp. 10.000.000	
		5.1.02.02.01.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1 Tahun	Rp 13.183.776	
		5.1.02.02.01.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 790.992	
		5.1.02.02.01.0007	Belanja Iuran Kematian bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 988.740	
		5.1.02.02.01.0012	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan bantuan teknik	1 Tahun	Rp. 39.500.000	239
		5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga	1 Tahun	Rp. 1.800.000	
		5.1.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1 Tahun	Rp. 7.841.517	
		5.1.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1 Tahun	Rp. 13.554.543	



		5.1.02.08.01. 0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1 Tahun	Rp. 1.087.245	
--	--	-----------------------	---	---------	---------------	--

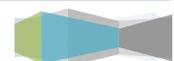




Foto-foto kegiatan pengujian sampel di laboratorium dan pengambilan sampel di lapangan

Untuk mendukung sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini di dukung oleh Kepala TU Laboratorium dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

4.2. Kepala UPT Kebersihan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor 1 UPT Kebersihan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut untuk Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan dengan indikator Persentase sarana prasarana kebersihan sesuai standar dan Persentase SDM kebersihan lingkungan yang berkualitas dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota di dukung Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala UPT Kebersihan dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2023 yang didukung oleh 144 orang SDM yaitu 13 orang PNS dan 131 orang PTT



Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPT Kebersihan

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN						
15	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	24	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	52.712,42 Ton	37.126,26 Ton	70.5%
16	Melakukan pengolahan sampah di TPA	25	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	17.250 Ton	15.782,13 Ton	91.49 %
17	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	26	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	11 Kecamatan	11 kecamatan	100%
18	Melaksanakan data pengolah sampah di Masyarakat	27	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	11 kecamatan	11 kecamatan	100%
19	Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota	28	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	11 kecamatan	11 kecamatan	100%
20	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	29	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	78 Unit (2 Armada Roda 2, 8 Unit Kontainer Sampah, 40 Buah Tempat Sampah 3 Warna, 25 Tempat Sampah Besar, 2 Buah Bangunan Pembakar Sampah Domestik, 1 Buah Halte)	78 Unit (2 Armada Roda 2, 8 Unit Kontainer Sampah, 40 Buah Tempat Sampah 3 Warna, 25 Tempat Sampah Besar, 2 Buah Bangunan Pembakar Sampah Domestik, 1 Buah Halte)	88 Unit (100%)
21	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	30	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	52 buah sarpras (100%)	52 buah sarpras (100%)	100%
22	Menurunnya timbunan sampah	31	Jumlah timbunan sampah	52,712.42	22,651.99	43%
23	Meningkatnya luasan TPS 3R	32	Persentase pertumbuhan luasan TPS 3R	11	1	9%
24	Meningkatnya peran masyarakat pengelolaan sampah 3R	33	Persentase bank sampah yang aktif	34	20	58.82

Narasi



B. Akuntabilitas Keuangan**Anggaran dan Realisasi APBD 2023****a. Belanja Tidak Langsung**

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut tabel belanja Tidak langsung tahun 2023:

Tabel Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2023

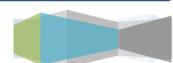
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Belanja Gaji dan tunjangan	4.567.225.911,00	3.695.652.518,00	80,92
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.088.890.380,00	3.476.247.033,00	85,02
Total		8.656.116.291,00	7.171.899.551,00	82,85



b. Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2023 APBD Murni ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan DPRKPLH, yang terdiri atas 12 (Dua belas) program yang terdiri atas 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 32 (Tiga puluh dua) sub kegiatan.

Tabel Anggaran dan Realisasi APBD 2023 pada DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

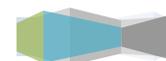
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023 3 5 = (4/ 3) * 100	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4/ 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	516.800.000	544.315.000,00	105,32	401.700.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	516.800.000	544.315.000,00	105,32	401.700.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0	0,00	0,00	292.500,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0	0,00	0,00	292.500,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0	0,00	0,00	292.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	516.800.000	544.315.000,00	105,32	401.408.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	516.800.000	544.315.000,00	105,32	401.408.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	16.800.000	19.100.000,00	113,69	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	500.000.000	525.215.000,00	105,04	401.408.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	516.800.000	544.315.000,00	105,32	401.700.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	516.800.000	544.315.000,00	105,32	401.700.500,00
5	BELANJA DAERAH	101.128.415.426	92.458.243.363,00	91,43	101.311.428.913,00
5.1	BELANJA OPERASI	42.813.338.388	37.312.753.325,00	87,15	48.264.754.158,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.656.116.291	7.171.899.551,00	82,85	7.733.392.979,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.567.225.911	3.695.652.518,00	80,92	3.781.630.877,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.048.813.419	2.486.262.041,00	81,55	2.681.096.623,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.997.253.099	2.477.362.541,00	82,65	2.681.096.623,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	51.560.320	8.899.500,00	17,26	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	315.383.456	259.573.984,00	82,30	287.752.112,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	311.838.860	259.573.984,00	83,24	287.752.112,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.544.596	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	181.110.000	166.110.000,00	91,72	164.050.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	181.110.000	166.110.000,00	91,72	164.050.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	121.080.000	88.400.000,00	73,01	103.199.800,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	116.500.000	88.400.000,00	75,88	103.199.800,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.580.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	100.295.000	83.629.850,00	83,38	89.315.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	99.695.000	83.075.000,00	83,33	89.315.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	600.000	554.850,00	92,48	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	212.241.400	175.690.920,00	82,78	191.985.420,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	205.289.080	175.473.660,00	85,48	191.985.420,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.952.320	212.260,00	3,13	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	255.116.435	201.039.979,00	78,80	3.372.842,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	249.029.140	201.039.979,00	80,73	3.372.842,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	6.087.295	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	149.744	39.847,00	26,61	42.075,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	109.872	39.679,00	36,11	42.075,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39.872	168,00	0,42	0,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	277.792.131	214.591.078,00	77,25	238.705.408,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	275.377.243	213.933.866,00	77,69	238.705.408,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.414.888	657.212,00	27,22	0,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.166.190	5.078.699,00	55,41	5.527.899,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.042.445	5.057.339,00	55,93	5.527.899,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	123.745	21.360,00	17,26	0,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	27.398.572	15.236.120,00	55,61	16.583.698,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	27.027.338	15.172.043,00	56,14	16.583.698,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	371.234	64.077,00	17,26	0,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.679.564	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.243.640	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	8.435.924	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.088.890.380	3.476.247.033,00	85,02	3.951.762.102,00



BAB III AKUNTABILITAS

5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.298.648.660	KIN 2.751.521.211,00	83,66	3.951.762.102,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.266.770.660	2.749.183.194,00	84,16	3.951.762.102,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31.878.000	10.338.017,00	32,43	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	790.241.720	716.725.822,00	90,70	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	775.241.720	716.725.822,00	92,45	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	15.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.014.722.097	23.998.353.774,00	85,66	32.696.361.179,00
5.1.02.01	Belanja Barang	6.114.382.598	5.467.649.673,00	89,42	8.867.542.684,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.113.082.598	5.466.399.673,00	89,42	8.867.542.684,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	226.633.439	190.200.800,00	83,92	19.656.800,00



BAB III AKUNTABILITAS

Kode Rekening	URAIAN	KINERJA		% 2023	REALISASI 2022
		ANGGARAN 2023	REALISASI 2023		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	145.692.334	138.993.800,00	95,40	119.239.084,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.586.165.705	2.363.694.000,00	92,47	2.201.778.300,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	64.806.535	57.187.500,00	88,24	86.415.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.934.561	4.425.000,00	89,67	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	106.060.500	106.000.000,00	99,94	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	123.022.617	104.344.100,00	84,82	3.396.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	417.011.782	369.478.358,00	88,60	138.271.782,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.037.049	56.329.500,00	82,79	42.322.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	34.500.000	34.500.000,00	100,00	40.880.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	87.396.384	76.351.400,00	87,36	20.280.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	276.355.452	220.707.495,00	79,86	118.730.700,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.071.288.412	886.716.500,00	82,77	2.205.166.400,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	24.266.620	18.905.000,00	77,91	214.379.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	0,00	0,00	16.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.745.000	1.700.000,00	97,42	1.995.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	309.610.242	289.585.000,00	93,53	61.404.518,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	905.760	0,00	0,00	3.283.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.295.706	18.284.420,00	90,09	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.860.000	156.300.000,00	97,17	106.875.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	291.255.000	261.946.800,00	89,94	65.115.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.300.000	6.300.000,00	100,00	8.550.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	99.067.500	89.250.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.872.000	15.200.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.300.000	1.250.000,00	96,15	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.300.000	1.250.000,00	96,15	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.373.557.466	15.807.033.123,00	86,03	14.969.142.049,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.590.014.975	15.133.063.632,00	86,03	14.217.902.562,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.000.000	21.000.000,00	65,63	24.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	129.750.000	128.500.000,00	99,04	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	69.900.000	60.000.000,00	85,84	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	323.660.000	300.026.000,00	92,70	336.319.740,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	826.350.000	813.150.000,00	98,40	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.508.000.000	2.489.000.000,00	99,24	5.350.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	427.400.000	417.600.000,00	97,71	1.245.360.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.895.600.000	2.874.700.000,00	99,28	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0	0,00	0,00	49.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	0,00	0,00	2.400.952,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000	9.960.000,00	99,60	12.861.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	0,00	0,00	9.935.980,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	621.755.579	618.513.713,00	99,48	1.332.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000	2.131.200,00	71,04	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.714.779.696	7.372.175.139,00	75,89	7.158.542.890,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.964.700	26.307.580,00	97,56	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	825.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	446.592.591	379.985.574,00	85,09	365.253.337,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	393.315.984	353.696.214,00	89,93	336.546.552,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	23.678.492	11.684.151,00	49,34	12.761.680,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	29.598.115	14.605.209,00	49,35	15.945.105,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000	4.096.000,00	91,02	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000	4.096.000,00	91,02	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000	2.519.200,00	31,49	478.400,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.000.000	2.519.200,00	31,49	478.400,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	199.999.900	199.109.025,00	99,55	40.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000	99.280.065,00	99,28	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.999.900	99.828.960,00	99,83	40.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	39.500.000	17.881.992,00	45,27	298.765.600,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	39.500.000	17.881.992,00	45,27	298.765.600,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	52.000.000	51.777.700,00	99,57	46.742.150,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	52.000.000	51.777.700,00	99,57	46.742.150,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	32.950.000	18.600.000,00	56,45	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	32.950.000	18.600.000,00	56,45	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.312.626.898	1.628.012.783,00	70,40	2.255.637.490,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.246.026.898	1.572.943.583,00	70,03	1.923.841.090,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	369.306.898	300.541.500,00	81,38	331.469.290,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	920.000	650.000,00	70,65	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00	246.960.300,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	601.000.000	374.176.550,00	62,26	25.709.250,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.075.500.000	761.505.550,00	70,80	894.806.250,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	71.500.000	62.569.633,00	87,51	24.478.350,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	71.000.000	46.122.350,00	64,96	43.424.150,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0	0,00	0,00	116.337.000,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0	0,00	0,00	75.457.000,00
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00	49.515.500,00

BAB III AKUNTABILITAS

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	6.000.000	KIN 53.272.500,00	62,08	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.000.000	1.953.000,00	32,55	105.234.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.000.000	1.600.000,00	26,67	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.300.000	5.100.000,00	80,95	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	17.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.500.000	10.500.000,00	100,00	4.200.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.500.000	4.500.000,00	100,00	3.250.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	331.796.400,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	107.828.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0,00	0,00	21.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	202.968.400,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.600.000	55.069.200,00	82,69	0,00
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	33.300.000	32.989.200,00	99,07	0,00
5.1.02.03.04.0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	33.300.000	22.080.000,00	66,31	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.214.155.135	1.095.658.195,00	90,24	904.038.956,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.214.155.135	1.095.658.195,00	90,24	904.038.956,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	587.342.135	562.088.195,00	95,70	494.538.956,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	626.813.000	533.570.000,00	85,12	409.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	5.700.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	5.700.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0	0,00	0,00	5.700.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.142.500.000	6.142.500.000,00	100,00	7.835.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.142.500.000	6.142.500.000,00	100,00	7.835.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.142.500.000	6.142.500.000,00	100,00	7.835.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.142.500.000	6.142.500.000,00	100,00	7.835.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	42.813.338.388	37.312.753.325,00	87,15	48.264.754.158,00
5.2	BELANJA MODAL	58.315.077.038	55.145.490.038,00	94,56	53.046.674.755,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.591.083.378	1.488.201.508,00	93,53	3.983.683.023,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.665.000	1.420.000,00	85,29	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.665.000	1.420.000,00	85,29	0,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	1.665.000	1.420.000,00	85,29	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	541.656.220	532.039.000,00	98,22	1.459.091.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	57.000.000	56.879.000,00	99,79	1.177.390.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	0,00	0,00	1.050.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	57.000.000	56.879.000,00	99,79	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0	0,00	0,00	127.390.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	484.656.220	475.160.000,00	98,04	281.701.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	12.656.220	11.160.000,00	88,18	281.701.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	472.000.000	464.000.000,00	98,31	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	23.105.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0,00	0,00	23.105.000,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perakasan Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0	0,00	0,00	7.950.000,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perakasan Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0	0,00	0,00	8.305.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	0	0,00	0,00	6.850.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	16.622.200	16.000.000,00	96,26	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	16.622.200	16.000.000,00	96,26	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	16.622.200	16.000.000,00	96,26	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	621.444.485	579.460.030,00	93,24	333.493.773,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	316.900.479	303.242.030,00	95,69	132.200.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	23.444.338	21.000.000,00	89,57	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	293.456.141	282.242.030,00	96,18	132.200.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	304.544.006	276.218.000,00	90,70	201.293.773,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	183.457.927	175.448.000,00	95,63	52.464.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	19.180.800	18.960.000,00	98,85	6.900.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	33.445.732	27.050.000,00	80,88	27.999.773,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	68.459.547	54.760.000,00	79,99	113.930.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	110.151.294	104.269.000,00	94,66	11.900.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	89.617.404	86.269.000,00	96,26	11.900.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	32.947.575	29.947.000,00	89,84	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	56.669.829	56.669.000,00	100,00	11.900.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	20.533.890	18.000.000,00	87,66	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	20.533.890	18.000.000,00	87,66	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	14.641.788	14.630.000,00	99,92	2.007.948.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	14.641.788	14.630.000,00	99,92	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	13.554.543	13.550.000,00	99,97	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.087.245	1.080.000,00	99,33	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	0,00	0,00	2.915.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0	0,00	0,00	2.915.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	0,00	0,00	1.895.533.000,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0	0,00	0,00	1.345.133.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0	0,00	0,00	550.400.000,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0	0,00	0,00	109.500.000,00
5.2.02.08.09.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	0	0,00	0,00	109.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	220.952.405	183.018.478,00	82,83	133.985.250,00

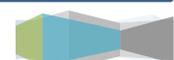
BAB III AKUNTABILITAS

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	178.716.971	144.500.000,00	80,85	109.300.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	178.716.971	144.500.000,00	80,85	109.300.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.235.434	38.518.478,00	91,20	24.685.250,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	42.235.434	38.518.478,00	91,20	24.685.250,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	63.949.986	57.365.000,00	89,70	12.360.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	48.135.150	43.365.000,00	90,09	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	48.135.150	43.365.000,00	90,09	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	15.814.836	14.000.000,00	88,52	12.360.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	15.814.836	14.000.000,00	88,52	12.360.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.295.769.863	1.136.305.543,00	87,69	8.024.909.505,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.295.769.863	1.136.305.543,00	87,69	7.639.408.805,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempatkan Kerja	1.295.769.863	1.136.305.543,00	87,69	7.639.408.805,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	657.455.746	649.842.376,00	98,84	387.797.700,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	26.817.600	23.726.000,00	88,47	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0	0,00	0,00	9.920.500,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0	0,00	0,00	6.865.384.605,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	611.496.517	462.737.167,00	75,67	376.306.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	0,00	385.500.700,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0	0,00	0,00	385.500.700,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0	0,00	0,00	331.217.700,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0	0,00	0,00	54.283.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.296.466.297	41.038.954.492,00	94,76	41.038.082.227,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.351.307.129	44.558.814.944,00	94,10	23.914.771.226,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.351.307.129	44.558.814.944,00	94,10	23.914.771.226,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	47.351.307.129	44.558.814.944,00	94,10	23.914.771.226,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0	0,00	0,00	2.771.275.001,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	0,00	0,00	2.771.275.001,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0	0,00	0,00	2.771.275.001,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.945.159.168	7.838.139.548,00	98,65	14.352.036.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.945.159.168	7.838.139.548,00	98,65	14.352.036.000,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	7.945.159.168	7.838.139.548,00	98,65	14.250.471.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	101.565.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	131.757.500	124.028.495,00	94,13	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	9.557.500	5.455.000,00	57,08	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	9.557.500	5.455.000,00	57,08	0,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	9.557.500	5.455.000,00	57,08	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	122.200.000	118.573.495,00	97,03	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	122.200.000	118.573.495,00	97,03	0,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	22.200.000	19.390.000,00	87,34	0,00
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	100.000.000	99.183.495,00	99,18	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	58.315.077.038	55.145.490.038,00	94,56	53.046.674.755,00
	JUMLAH BELANJA	101.128.415.426	92.458.243.363,00	91,43	101.311.428.913,00
	SURPLUS/DEFISIT	(100.611.615.426)	(91.913.928.363,00)	91,36	(100.909.728.413,00)

Kab. Tanah Laut, 08 Januari
2024
Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup

2. ANGGARAN REALISASI MENURUT SASARAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS	KODE	URAIAN (PROGRAM/KEGIATAN)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1.04.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000,00			
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000,00	11.650.000,00	83,21	2.350.000,00
	1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000,00	2.847.500,00	88,98	352.500,00
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.459.203.298,00			
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.440.203.298,00	7.733.392.979,00	98,64	106.810.319,00
	1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.000.000,00	15.688.000,00	82	3.312.000,00
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.880.382,00		
1.04.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	434.904.223,00	385.383.150,00	88,61	49.521.073,00
1.04.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.994.670,00	18.785.550,00	93,95	1.209120,00
1.04.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.975.957,00	49.969.500,00	98,03	1.006.457,00
1.04.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.995.000,00	360.084.450,00	95,77	15.910.550,00
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.576.725,00			
	1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mabel	133.710.063,00	112.644.000,00	84,24	21.066.063,00
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.246.710,00	245.430.939,00	75,46	79.815.771,00



	1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.980.396,00	19.576.632,00	97,98	403.764,00
	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.020.654.534,00	5.986.655.337,00	99,44	33.999.197,00
Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	339.944.412,00	332.527.250,00	97,82	7.417.162,00
	1.04.01.2.09.06	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.350.000,00	15.150.000,00	92,66	1.200.000,00
	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	107.828.000,00	89,86	12.172.000,00
Meningkatnya rumah layak huni masyarakat pasca Bencana/relokasi program	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000,00			
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00			
	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	100.000.000,00	99.525.200,00	99,53	474.800,00
Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1.04.03	ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.325.190.000,00			
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.325.190.000,00			
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.050.186.776,00	3.977.737.870,00	98,21	72.448.906,00
	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	-	-	-
	1.04.03.2.03.06	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	10.252.020.000,00	10.252.020.000,00	100	-
Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas PSU	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	25.928.996.288,00			
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	25.928.996.288,00			
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.928.996.288,00	24.114.011.626,00	93,00	1.814.984.662,00
Meningkatnya wilayah Bebas pencemaran lingkungan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				



	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	110.462.612,00	100.757.176,00	91,21%	9.705.436,00
	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	283.071.501,00	263.776.678,00	93,18%	19.294.823,00
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2.11.03	PROGRAM PENGENDALI PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.731.009.325,00			
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	1.489.813.493,00	1.379.818.409,00		109.995.084,00
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	148.452.253	132.837.450,00	89,48%	15.614.803
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.173.905.832,00	1.134.074.325,00		39.831.507,00
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.665.842,00			
	2.11.03.2.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penghentian Sumber Pencemaran	66.665.842,00	62.515.000,00	93,77	4.150.842,00
Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	2.11.04	ROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	11.596.474.919,00			
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.596.474.919,00	11.275.609.156,00	97,23	320.865.763,00
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.596.474.919,00	11.275.609.156,00	97,23	320.865.763,00
Meningkatnya pembinaan hidup (PPLH)	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	81.789.669,00			
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.789.669,00	78.844.600,00		2.945.069,00
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	106.206.285,00	101.629.206,00	95,69%	4.577.079,00
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.959.819,00	55.989.600,00		970.219,00



	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.999.619,00			
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.999.619,00	18.793.000	93,97	1.206.619
	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.999.619,00	18.793.000	93,97	1.206.619 254
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.479.883.000,0 0			
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.098.743.447,0 0	4.351.192.796,0 0	79,41	1.128.050.376,00
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.390.883.172,0 0	4.265.097.796,0 0	79,12	1.125.785.376,00
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	88.360.000,00	86.095.000,00	97,44	2.265.000,00
Meningkatnya penyebaran jaringan PJU	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30.539.418.575,00	29.037.252.094 ,00	95,08	1.502.166.481,00
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.539.418.575,00	29.037.252.094 ,00	95,08	1.502.166.481,00
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.539.418.575,0 0	29.037.252.094 ,00	95,08	1.502.166.481,00
		JUMLAH	106.649.899.448 ,00			





No	SASARAN STRATEGIS	IK SARGIS	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/ Sub KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.459.203.298,00
2	Meningkatnya pengeolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase Saranan Dan Prasarana Yang Dikelola Sesuai Standar		Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366.880.382,00



3	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase Saranan Dan Prasarana Yang Dikelola Sesuai Standar		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mabel	104.576.725,00
4		Persentase Saranan Dan Prasarana Yang Dikelola Sesuai Standar		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.365.881.640,00
5	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	476.294.412,00
6	Meningkatnya rumah layak huni masyarakat pasca Bencana/relokasi program	Persentase Rumah Yang Sehat Dan Layak Huni Bagi Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	100.000.000,00

7	Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase Rumah Yang Sehat Dan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	8.325.190.000,00
8	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas PSU	Persentase Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Terfasilitasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.928.996.288,00
9	Meningkatnya wilayah Bebas pencemaran lingkungan	- Persentase Kajian Lingkungan Hidup Yang Bisa Di Manfaatkan - Persentase Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota - - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	393.534.113,00
10	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase Parameter Kualitas Air Dan Udara Ambient Hasil Pemantauan Yang Memenuhi Baku Mutu	PROGRAM PENGENDALI PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara	538.462.480,00



				<p>dan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 	
11		259		<p>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penghentian Sumber Pencemaran 	66.665.842,00
12	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase Kawasan Taman Yang Dapat Dinikmati Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	<p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	11.596.474.919,00
13	Meningkatnya pembinaan hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<p>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	245.666.918,00



14		Persentase Pengelolaan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.999.619,00
15	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Presentase Sarana Prasarana Kebersihan Sesuai Standar 2.Presentase SDM Kebersihan Lingkungan Yg Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5.479.883.000,00
16	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU	Persentase Jaringan PJU Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.539.418.575,00



3. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN 2023

No	Tahun 2022				Tahun 2023			
	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN /Sub KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/S ub KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000,00	14.497.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.899.700,00	26.247.500,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.859.203.298,00	7.749.080.979,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.934.905.472,00	6.831.552.898,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan	881.869.850,00	814.222.650,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	795.075.710,00	715.381.295,00



		Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.274.674,0 0	339.344.366,0 0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mabel	133.710.06 3,00	112.644.00 0,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mabel	233.686.989,0 0	211.240.000,0 0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.365.881. 640,00	6.251.662. 908,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.419.200,0 0 26.749.690,00 13.690.380,00	90.194.553,00 15.100.000,00 13.362.600,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	476.294.41 2,00	455.505.25 0,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	218.194.610,0 0	210.972.190,0 0

		Dinas Operasional atau Lapangan - Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Dinas Operasional atau Lapangan - Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.369.691,00	58.180.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	100.000.000,00	99.525.200,00		-	-	-
	ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	14.302.206.776,00	14.229.757.870,00	ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00

		- Pembangun an Rumah Baru Layak Huni						
	PROGRA M PENINGK ATAN PRASAR ANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.928.996 .288,00	24.114.011 .626,00	PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.311.648.224, 00	1.222.632.94 0,00
							22.799.928.46 3,00	22.164.605.53 6,00
	PROGRA M PERENC ANAAN LINGKUN GAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Ko ta - Pengendalia n Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	69.936.000, 00	65.505.300, 00	PROGRAM PERENCAN AAN LINGKUNG AN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Ko ta	213.858.016,0 0	204.074.435,0 0
	PROGRA M PERENC ANAAN LINGKUN GAN HIDUP	Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Ko ta - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	-	PROGRAM PERENCAN AAN LINGKUNG AN HIDUP	Penyelenggaraa n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	283.071.501,0 0	263.776.678,0 0





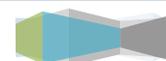
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.731.009.325,00	2.643.323.984,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	243.000.000,00	235.611.900,00	
							215.085.356,00	200.171.685,00	264
							3.971.146.616,00	3.666.331.906,00	
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.665.842,00	62.515.000,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penghentian Sumber Pencemaran	144.999.900,00	129.290.000,00	



	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.596.474. .919,00	11.275.609. .156,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.933.521.872, 00	9.633.843.443, 00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.789.669, 00	78.844.600, 00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	142.733.606	106.206.285
							162.609.786	116.387.966
							60.561.100	40.583.684



	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.999.619,00	18.793.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	115.021.596	89.482.985
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5.479.883.000,00	4.351.192.796,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana	11.367.883.776	10.880.418.867
							219.551.548	210.162.298
							72.577.273	40.995.000
							1.542.198.04	1.355.878.77





						Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	8
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.539.418.575,00	29.037.252.094,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.701.024.717	19.113.406.798



No.	2022			2023		
	Belanja Langsung	ANGGARAN	REALISASI	Belanja Langsung	ANGGARAN	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	7.840.203.298	7.733.392.979	Belanja Pegawai	8.656.116.291	7.171.899.551
2.	Belanja Barang dan Jasa	37.562.085.128	32.696.361.179	Belanja Barang dan Jasa	28.014.722.097	23.998.353.774
	JUMLAH	45.402.288.426	40.429.754.158	JUMLAH	36.670.838.388	31.170.253.325



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan laporan pertanggung jawaban pertama terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **15 Sasaran Strategis 37 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 115,28% dengan rincian 12 (dua belas) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **lebih dari 100%**, 30 (tiga puluh) indikator dengan tingkat capaian kinerja **100%**, 10 (sepuluh) indikator dengan tingkat capaian kinerja **kurang dari 100%**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan DPRKPLH dan seluruh pejabat struktural DPRKPLH dalam meningkatkan penerapan SAKIP di masing-masing lingkup Sekretariat/Bidang /UPT DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.
2. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi DPRKPLH dan Kabupaten.
3. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari individu pegawai ,level Eselon IV, level Eselon III sampai dengan indikator kinerja level eselon II.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2022 disampaikan untuk menjadi bahan Lebih lanjut

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. ZAINAL ABIDIN
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19641013 198603 1 012

